

Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan
Keuangan Khusus (BKK) Keistimewaan Kalurahan terhadap
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul



Diajukan oleh
YADIANTO ANGGORO
22918024

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan
Keuangan Khusus (BKK) Keistimewaan Kalurahan terhadap
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul

Tesis S-2

Program Magister Ilmu Ekonomi



Diajukan oleh

YADIANTO ANGGORO

22918024

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang jelas disebutkan dalam naskah ini dan tercantum dalam daftar referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, Desember 2024



[Signature]
Yudianto Anggoro

TESIS

Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) Keistimewaan Kalurahan terhadap
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul

Diajukan oleh

Yadiano Anggoro

22918024

telah disetujui oleh :

Yogyakarta, 12 November 2024

Dosen Pembimbing,



Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

- magister manajemen (S-2)
- magister akuntansi (S-2)

- magister ilmu ekonomi (S-2)
- doktor ilmu ekonomi (S-3)

HALAMAN PENGESAHAN
REVISI DAN PENJILIDAN TESIS

Nama Mahasiswa : **YADIANTO ANGGORO**
No. Mahasiswa : 22918024
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Kebijakan
Dosen Pembimbing : Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.

Judul Tugas Akhir

**ANALISIS PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEISTIMEWAAN KALURAHAN
TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

Yogyakarta, 19/12/2024

Dosen Pembimbing

Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.

CATATAN:

- 2 (dua) Lembar Catatan Revisi Harap Ditunjukkan Ke Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waramahtullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Keistimewaan Kalurahan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul”. Tesis inidisusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi & Keuangan pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

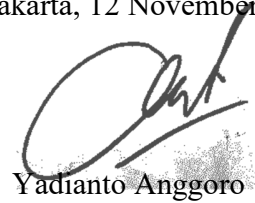
1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D. selaku pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Keluarga tercinta Bapak, Ibu, Istri, dan anak-anak yang selalu memberikan semangat, dukungan dan keperluan data dalam penulisan tesis ini.
4. Pimpinan dan staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul khususnya Bidang Perencanaan yang selalu memberikan semangat, dukungan dan keperluan data dalam penulisan tesis ini.
5. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 26 yang selalu memberikan semangat, saling mendukung dan berbagi pengalaman selama masa studi dan penulisan tesis ini
6. Seluruh dosen dan staff Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa studi.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apa pun selama penyusunan tesis ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 November 2024



Yadiano Anggoro

DAFTAR ISI

KOVER.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1. Indeks Desa Membangun.....	13
2.2. Dana Desa	19
2.3. Alokasi Dana Desa.....	22
2.4. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (BKK DAIS Kalurahan)	25
2.5. Penelitian Terdahulu	29
2.6. Kerangka Pikiran	39
2.7. Pengembangan Hipotesis	40
2.8. Pernyataan Hipotesis.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis dan sumber data	43

3.2.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	43
3.2.1.	Variabel <i>dependen</i> (terikat).....	43
3.2.2.	Variabel <i>independen</i> (bebas).....	43
3.3.	Metode Analisis	46
3.4.	Pendekatan Model Regresi Data Panel	47
3.4.1.	Pendekatan Regresi Data Panel dengan <i>Common Effect Model</i>	47
3.4.2.	Pendekatan Regresi Data Panel dengan <i>Fixed Effect Model</i> .	47
3.4.3.	Pendekatan Regresi Data Panel dengan <i>Random Effect Model</i>	48
3.5.	Uji Kesesuaian Model.....	48
3.5.1.	Uji Lagrange Multiplier	49
3.5.2.	Uji Chow	50
3.5.3.	Uji Hausman	50
3.6.	Pengujian Hipotesis	51
3.6.1.	Koefisien Determinasi R-Squared (R^2).....	51
3.6.2.	Uji t	51
3.6.3.	Uji F	52
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1.	Hasil Penelitian	53
4.1.1.	Indeks Desa Membangun.....	53
4.1.2.	Dana Desa	55
4.1.3.	Alokasi Dana Desa.....	59
4.1.4.	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan .	62
4.2.	Analisis Data Panel.....	67
4.2.1.	Estimasi Model Regresi Panel	67
4.2.1.1.	Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal	67
4.2.1.2.	Regresi Panel IDM, DD, ADD	69
4.2.1.3.	Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal	70

4.2.1.4. Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK	
DAIS Kal	72
4.2.2. Teknik Penaksiran Model	73
4.2.2.1. Uji Chow.....	73
4.2.2.2. Uji Hausman	75
4.2.3. Pengujian Hipotesis Penelitian.....	80
4.2.2.1. Uji koefisien deteminasi (R^2).....	80
4.2.2.2. Uji parsial (uji t).....	82
4.2.2.3. Uji Simultan (uji F).....	84
4.3. Pembahasan	87
4.3.1. Dana Desa	87
4.3.2. Alokasi Dana Desa.....	88
4.3.3. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan .	90
4.3.4. Penaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan terhadap Indeks Desa Membangun	91
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	95
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Implikasi	96
5.3. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023.....	2
Tabel 1.2 Anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023	2
Tabel 1.3 Anggaran Bantuan Keuangan Khusus DAIS Desa/Kalurahan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2023	5
Tabel 1.4 Indeks Desa Membangun Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2023	6
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Lima Desa Terbesar dan Terkecil Pertumbuhan IDM dan DD tahun 2019-2023	57
Tabel 4.2 Lima Desa Terbesar dan Terkecil Pertumbuhan IDM dan ADD tahun 2019-2023	61
Tabel 4.3 Pertumbuhan IDM terhadap Desa yang tidak menerima Anggaran BKK DAIS Kalurahan.....	65
Tabel 4.4 Lima Desa Mandiri Terbesar dan Terkecil Pertumbuhan IDM dan BKK DAIS Kalurahan tahun 2019-2023.....	66
Tabel 4.5 Hasil estimasi IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan <i>Common Effect Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> , dan <i>Random Effect Model</i>	67
Tabel 4.6 Hasil estimasi IDM, DD, ADD dengan <i>Common Effect Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> , dan <i>Random Effect Model</i>	69
Tabel 4.7 Hasil estimasi IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan <i>Common Effect Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> , dan <i>Random Effect Model</i>	70
Tabel 4.8 Hasil estimasi IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan <i>Common Effect Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> , dan <i>Random Effect Model</i>	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal.....	74
Tabel 4.10 Hasil Uji Chow Regresi Panel IDM, DD, ADD	74

Tabel 4.11 Hasil Uji Chow Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal.....	75
Tabel 4.12 Hasil Uji Chow Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal	75
Tabel 4.13 Hasil Uji Hausman Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal..	76
Tabel 4.14 Hasil Model <i>Fixed Effect</i> IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal.....	76
Tabel 4.15 Hasil Uji Hausman Regresi Panel IDM, DD, ADD.....	77
Tabel 4.16 Hasil Model <i>Fixed Effect</i> IDM, DD, ADD	77
Tabel 4.17 Hasil Uji Hausman Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal.....	78
Tabel 4.18 Hasil Model <i>Fixed Effect</i> IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal	78
Tabel 4.19 Hasil Uji Hausman Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal	79
Tabel 4.20 Hasil Model <i>Fixed Effect</i> IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal.....	79
Tabel 4.21 Hasil Uji R2 Model <i>Fixed Effect</i> IDM, DD, ADD, dan BKK DAIS Kal	80
Tabel 4.22 Hasil Uji R2 Model <i>Fixed Effect</i> IDM, DD dan ADD.....	80
Tabel 4.23 Hasil Uji R2 Model <i>Fixed Effect</i> IDM (Mandiri), DD, ADD, dan BKK DAIS Kal.....	81
Tabel 4.24 Hasil Uji R2 Model <i>Fixed Effect</i> IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, dan BKK DAIS Kal	81
Tabel 4.25 Hasil Uji-t Model <i>Fixed Effect</i> IDM, DD, ADD, dan BKK DAIS Kal	82
Tabel 4.26 Hasil Uji-t Model <i>Fixed Effect</i> IDM, DD, ADD	82
Tabel 4.27 Hasil Uji-t Model <i>Fixed Effect</i> IDM (Mandiri), DD, ADD, dan BKK DAIS Kal.....	83
Tabel 4.28 Hasil Uji-t Model <i>Fixed Effect</i> IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, dan BKK DAIS Kal	84
Tabel 4.29 Hasil Uji-f Model <i>Fixed Effect</i> IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal.....	85
Tabel 4.30 Hasil Uji-f Model <i>Fixed Effect</i> IDM, DD, ADD	85

Tabel 4.31 Hasil Uji-f Model <i>Fixed Effect</i> IDM (Mandiri), DD, ADD, dan BKK DAIS Kal.....	86
Tabel 4.32 Hasil Uji-f Model <i>Fixed Effect</i> IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, dan BKK DAIS Kal	86
Tabel 4.33 Hasil Model <i>Fixed Effect</i> seluruh model uji regresi	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran.....	39
Gambar 4.1 Grafik Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	53
Gambar 4.2 Grafik Anggaran Dana Desa (DD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	55
Gambar 4.3 Grafik Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023	59
Gambar 4.4 Grafik Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2023	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023.	103
2. Dana Desa (DD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023	107
3. Alokasi Dana Desa(ADD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023.....	110
4. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2023	112
5. Hasil Regresi Model Fixed Effect.....	117
a. IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal.....	117
b. IDM, DD, ADD	117
c. IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal	118
d. IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah mencakup penciptaan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Pembangunan desa juga mengedepankan kebersamaan dan partisipasi masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerintahan desa yang profesional dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, perencanaan dan pengelolaan dana desa menjadi krusial, karena alokasi dana yang tepat dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pengembangan aset desa, serta memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya desa.

Setiap desa menerima dana yang besar dari Pemerintah Daerah (APBD) maupun Pemerintah Pusat (APBN). Dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2024. Dana ini digunakan untuk membiayai pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan, dengan prinsip pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 mengatur alokasi dana desa, yang terdiri dari Alokasi Dasar (65%), Alokasi Afirmasi (1%), Alokasi Kinerja (4%), dan Alokasi Formula (30%), untuk mendorong pembangunan desa yang merata. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1, besar anggaran DD di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan terhitung dari

tahun 2019-2021 dan di tahun 2022 mengalami penurunan, dan kembali meningkat di tahun 2023.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023

TAHUN	PAGU ANGGARAN DANA DESA
2019	136.052.137.000
2020	142.022.003.000
2021	144.614.409.000
2022	144.366.117.000
2023	175.848.933.000

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul 2024
(Data diolah)*

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian penting dari keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat untuk mendukung otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Setelah ditetapkan, ADD wajib dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai komitmen untuk mendukung pembangunan dan memperkuat pemerintahan desa, dengan proses yang harus transparan dan akuntabel. Anggaran ADD yang dialokasikan oleh Kabupaten Gunungkidul kepada Desa mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019-2023 seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023

TAHUN	PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA
2019	98.617.955.500
2020	103.060.047.200
2021	103.499.813.800
2022	105.317.212.500
2023	112.417.212.500

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul 2024
(Data diolah)*

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki status khusus yang memberikan hak istimewa tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Dana keistimewaan (DAIS) ini diberikan kepada DIY sebagai bagian dari hak istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2). DAIS DIY dialokasikan pemerintah pusat untuk mendanai 5 (lima) kewenangan urusan keistimewaan DIY, sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 7, yakni antara lain: (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (ii) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (iii) Kebudayaan, (iv) Pertanahan, (v) Tata Ruang. Adapun salah satu tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dijelaskan di dalam UUK Nomor 13 tahun 2012 pasal 5 huruf b, salah satunya adalah bertujuan untuk “mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat”.

Pedoman pelaksanaan urusan keistimewaan DIY dalam menentukan arah kebijakan, strategi dan pokok program keistimewaan sesuai dengan tujuan keistimewaan dituangkan dalam Grand Design Keistimewaan. Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY Tahun 2022-2042 menyebutkan bahwa untuk mengukur keberhasilan tujuan keistimewaan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Keistimewaan yang menunjukkan ketercapaian semua tujuan keistimewaan.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 mengatur tentang penugasan urusan keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan ini mencakup urusan-urusan seperti Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Pelaksanaan urusan-urusan ini diintegrasikan dengan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan untuk memastikan bahwa mereka mampu mengelola dan mengimplementasikan urusan-urusan tersebut secara efektif. Kebijakan bantuan keuangan khusus keistimewaan bagi desa/kalurahan merupakan salah satu

bentuk intervensi pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa/kalurahan. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa/kalurahan.

Kabupaten Gunungkidul berusaha mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Meskipun Kabupaten Gunungkidul masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan indikator kesejahteraan, upaya maksimal diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan urusan keistimewaan Yogyakarta yang didanai oleh DAIS. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam percepatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dengan mendorong Pemerintah Desa/Kalurahan untuk berperan aktif dan berupaya maksimal dalam mengakses DAIS.

Urusan Keistimewaan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan mencakup berbagai aspek, termasuk urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Urusan kelembagaan meliputi penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur Kalurahan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan budaya pemerintahan.

Urusan kebudayaan meliputi perumusan dan penetapan regulasi kebijakan dan pedomanan teknis pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan pada tingkat kalurahan, serta perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan objek kebudayaan peringkat/tingkat kalurahan. Selain itu, melibatkan peningkatan peran masyarakat Kalurahan terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, pendataan potensi budaya Kalurahan, penyelenggaraan dan pengelolaan kalurahan/kelurahan budaya dan atau Kawasan budaya, dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan kebudayaan.

Urusan pertanahan mencakup inventarisasi dan pencatatan dokumen terkait Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan. Selain itu, juga mencakup pencatatan perbuatan hukum terkait tanah tersebut, penerbitan surat keterangan status tanah, bantuan pemberkasan pendaftaran tanah, penunjukan batas bidang tanah, pemasangan patok batas, pemantauan dan penertiban pemanfaatan tanah, serta fasilitasi penanganan masalah tanah. Juga termasuk upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan, kehilangan, dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, perwujudan administrasi pertanahan yang tertib di Kalurahan, serta penyusunan peraturan tentang pemanfaatan tanah di Kalurahan.

Urusan Tata Ruang yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan meliputi penyebarluasan informasi rencana tata ruang pada satuan ruang strategis, pelaksanaan bantuan pemantauan pemanfaatan ruang sesuai izin pada satuan ruang strategis, pelaksanaan laporan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis, pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan ruang strategis Kadipaten, serta pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten. Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus DAIS dari Pemerintah Daerah DIY kepada Desa di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2023 seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Anggaran Bantuan Keuangan Khusus DAIS Desa/Kalurahan
Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2023

TAHUN	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAIS DESA/KALURAHAN
2021	15.323.134.000
2022	33.488.100.000
2023	41.749.460.000

*Sumber : Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta 2024
(Data diolah)*

Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa ini, membuat pemerintah pusat perlu membuat suatu pengukuran. Sehingga dikeluarkanlah Permendesa PDTTrans No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan desa berdasarkan tiga dimensi utama: dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. IDM memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi dan kemajuan pembangunan di desa, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Dari data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2023 menunjukkan IDM 4 (empat) Kabupaten di Pemerintah Daerah DIY yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulonprogo berstatus Mandiri dan Kabupaten Gunungkidul berstatus Maju.

Tabel 1.4
Indeks Desa Membangun Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2019-2023

KABUPATEN	2019	2020	2021	2022	2023
BANTUL	0,8031	0,8170	0,8356	0,8566	0,8751
SLEMAN	0,7820	0,7985	0,8119	0,8290	0,8446
KULONPROGO	0,7008	0,7222	0,7512	0,7856	0,8179
GUNUNGKIDUL	0,7318	0,7531	0,7595	0,7968	0,8110

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - <https://idm.kemendesa.go.id> (Data diolah)

Berdasarkan data Tabel 1.4, perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di empat kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai IDM yang cenderung lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kulon Progo. Namun pada tahun 2023, posisi ini berubah dengan Gunungkidul memiliki nilai IDM yang lebih rendah dibanding kabupaten lainnya di DIY. Fenomena penurunan ini menarik perhatian karena meskipun IDM Gunungkidul secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IDM di Kabupaten Gunungkidul. Perlu dikaji lebih lanjut apakah ada faktor spesifik seperti kebijakan atau program pembangunan daerah yang

mungkin mendorong atau justru menghambat kemajuan IDM di kabupaten Gunungkidul. Salah satu faktor penting yang akan dianalisis dalam konteks ini adalah Program Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (BKK DAIS Kalurahan) yang diharapkan dapat mendorong perkembangan desa namun mungkin memiliki dampak yang berbeda di setiap wilayah. Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi apakah BKK DAIS Kalurahan telah berkontribusi pada peningkatan IDM di Gunungkidul atau jika terdapat faktor lain yang justru menahan perkembangan pembangunan desa di daerah tersebut. Isu yang mirip pernah dikaji untuk daerah-daerah lain. Misalnya, Arina, Masinambow, dan Walewangko (2021) meneliti pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap IDM di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini mencatat fluktuasi anggaran dana desa dari tahun ke tahun, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun dana desa berperan signifikan dalam pembangunan, temuan menunjukkan bahwa penggunaannya sering kali lebih fokus pada pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya.

Penelitian Iftitah dan Wibowo (2022) di Kabupaten Gowa juga menyoroti pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap IDM. Ditemukan bahwa dana desa dan PADes yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdampak positif terhadap pembangunan dan kemandirian ekonomi desa, sementara ADD tidak memberikan pengaruh signifikan karena lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian serupa perlu dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan anggaran DD, ADD, dan terutama BKK DAIS Kalurahan, yang tidak muncul di penelitian-penelitian sebelumnya, terhadap IDM di Kabupaten Gunungkidul. Sehingga bisa diketahui sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut efektif dalam mendorong pembangunan desa. Oleh karena itu, analisis kebijakan anggaran DD, ADD dan BKK

DAIS Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul menjadi relevan dan penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan IDM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas khususnya penggunaan BKK DAIS Kalurahan dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk masa depan. Dengan demikian, diharapkan bantuan keuangan khusus ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan IDM di Kabupaten Gunungkidul.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana dampak kebijakan bantuan keuangan khusus keistimewaan bagi desa/kalurahan terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kebijakan bantuan keuangan khusus keistimewaan bagi desa/kalurahan dalam meningkatkan IDM di Kabupaten Gunungkidul?
- c. Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam peningkatan IDM antara desa/kalurahan yang menerima bantuan keuangan khusus keistimewaan dengan desa yang tidak menerima bantuan tersebut di Kabupaten Gunungkidul?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis dampak kebijakan bantuan keuangan khusus keistimewaan bagi desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan bantuan keuangan khusus keistimewaan bagi desa dalam meningkatkan IDM di Kabupaten Gunungkidul.

- c. Membandingkan tingkat peningkatan IDM antara desa yang menerima bantuan keuangan khusus keistimewaan dengan desa yang tidak menerima bantuan di Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang analisis kebijakan publik, khususnya dalam konteks pembangunan desa. Penulis juga akan mengembangkan keterampilan dalam pengumpulan dan analisis data serta penulisan ilmiah.
 - b. Memberikan kontribusi pada kajian ilmiah di bidang pembangunan desa dan kebijakan publik, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
 - c. Memperoleh pengalaman yang bermanfaat dalam bidang analisis kebijakan dan implementasinya di lapangan, yang dapat meningkatkan kapasitas profesional penulis dalam kariernya di masa depan
2. Bagi Akademisi
 - a. Menambah literatur ilmiah yang tersedia mengenai dampak kebijakan bantuan keuangan khusus keistimewaan bagi desa, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi dalam kajian-kajian selanjutnya.
 - b. Menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk menguji teori-teori yang ada atau mengembangkan teori baru terkait pembangunan desa dan kebijakan publik.
 - c. Mendorong akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut, baik untuk mengkaji topik yang sama dari perspektif berbeda maupun untuk mengeksplorasi aspek-aspek lain dari kebijakan bantuan keuangan khusus.

3. Bagi Pemerintah
 - a. Dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan bantuan keuangan khusus keistimewaan bagi desa/kalurahan dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan bantuan keuangan khusus, sehingga program yang dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran.
 - c. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan khusus keistimewaan bagi desa/kalurahan.
4. Bagi Masyarakat
 - a. Penelitian ini dapat membantu masyarakat desa/kalurahan diharapkan dapat merasakan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
 - b. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses pembangunan desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
 - c. Penelitian ini Masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan transparan mengenai dampak kebijakan bantuan keuangan khusus keistimewaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap program-program pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tinjauan terhadap teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperkuat landasan teoretis penelitian dan menunjukkan bahwa peneliti memiliki wawasan yang cukup tentang topik yang diteliti.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, dan pengujian hipotesis.

4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penyajian hasil penelitian secara deskriptif yang meliputi indeks desa membangun, dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan kalurahan. Pada bagian analisis data panel menjelaskan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, dimulai dari estimasi model regresi panel, dilanjutkan dengan teknik penaksiran model dan pengujian hipotesis penelitian. Serta bagian Pembahasan menganalisis secara lebih mendalam peran dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan kalurahan, serta pengaruh ketiga aspek ini terhadap indeks desa membangun.

5. BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Pada bab ini merangkum hasil penelitian mengenai Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan Kalurahan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul. Bagian Kesimpulan menyajikan ringkasan temuan utama penelitian, yang menjawab tujuan serta hipotesis penelitian tentang pengaruh masing-masing faktor terhadap Indeks Desa Membangun. Pada bagian Implikasi, dibahas dampak dari hasil penelitian ini terhadap kebijakan pengelolaan dana desa dan alokasi bantuan keuangan di daerah Gunungkidul, serta bagaimana hasil ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan desa secara berkelanjutan.

Pada bagian Saran menyajikan rekomendasi yang ditujukan baik kepada pihak pemerintahan daerah dan pemerintah desa maupun peneliti berikutnya, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan Kalurahan dan memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut yang relevan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (idm.kemendes.go.id). IDM pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Indeks ini dirancang untuk mengukur kemajuan desa dari berbagai aspek, meliputi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi lingkungan. Dengan adanya IDM, tingkat perkembangan setiap desa dapat dipetakan, sehingga upaya pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Kehadiran IDM membawa angin segar bagi pembangunan desa di Indonesia. Sebelumnya, program pembangunan desa sering kali terhambat oleh adanya tumpang tindih kebijakan dari berbagai kementerian atau lembaga, yang mengakibatkan pembangunan desa tidak berjalan optimal dan terkesan sporadis. IDM hadir sebagai solusi dengan menyatukan berbagai indikator pembangunan desa ke dalam satu indeks yang mudah dipahami. IDM mencakup tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan, yang masing-masing dimensi dijabarkan lebih lanjut ke dalam variabel dan indikator yang spesifik. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai komponen yang menyusun IDM:

a. Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Sosial (IKS) bertujuan untuk mengukur sejauh mana desa mampu menyediakan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya secara berkelanjutan. Komponen ini mencakup empat dimensi utama:

1. Modal Sosial: Dimensi ini meliputi indikator-indikator seperti solidaritas sosial, toleransi, rasa aman, dan kesejahteraan sosial. Solidaritas sosial diukur

melalui kebiasaan gotong royong, keberadaan ruang publik yang terbuka, fasilitas olahraga, dan kelompok kegiatan olahraga. Toleransi dilihat dari keragaman suku atau etnis, penggunaan bahasa yang berbeda dalam komunikasi sehari-hari, dan keragaman agama di desa. Rasa aman diukur melalui pemeliharaan poskamling, partisipasi warga dalam siskamling, tingkat kriminalitas, tingkat konflik, dan upaya penyelesaian konflik. Kesejahteraan sosial dilihat dari akses ke Sekolah Luar Biasa dan keberadaan penyandang kesejahteraan sosial.

2. Kesehatan: Indikator dalam dimensi ini meliputi akses terhadap pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter, serta fasilitas kesehatan seperti poskesdes, polindes, dan posyandu. Waktu tempuh ke fasilitas kesehatan yang kurang dari 30 menit juga menjadi salah satu indikator penting dalam dimensi ini.
3. Pendidikan: Dimensi pendidikan mencakup akses dan kualitas pendidikan di desa. Indikatornya bisa meliputi ketersediaan dan aksesibilitas ke lembaga pendidikan, kualitas pendidikan yang diberikan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan.
4. Permukiman: Indikator dalam dimensi ini menilai kondisi permukiman di desa, termasuk akses terhadap sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan infrastruktur perumahan. Kondisi fisik permukiman dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi bagian dari evaluasi dalam dimensi ini.

b. Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk bertahan dan berkembang secara ekonomi. Komponen utama IKE dalam IDM mencakup berbagai faktor, antara lain:

1. Pendapatan Rumah Tangga: Menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga di wilayah tersebut, yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi masa depan.

2. Pekerjaan dan Kesempatan Kerja: Meliputi tingkat pengangguran, jenis pekerjaan yang tersedia, dan kesempatan kerja, yang berpengaruh pada stabilitas ekonomi wilayah.
3. Ketimpangan Pendapatan: Menggambarkan sejauh mana pendapatan didistribusikan merata di antara penduduk, yang bisa mencerminkan stabilitas sosial dan ekonomi.
4. Akses Terhadap Layanan Keuangan: Merujuk pada ketersediaan layanan keuangan formal, seperti perbankan dan kredit, yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengelola risiko dan mengembangkan usaha kecil.
5. Ketahanan Terhadap Krisis Ekonomi: Menunjukkan seberapa baik wilayah tersebut dapat pulih dari krisis ekonomi, termasuk faktor diversifikasi ekonomi dan infrastruktur.
6. Keseimbangan Pembangunan Ekonomi: Mencakup distribusi sumber daya ekonomi, investasi, dan peluang ekonomi, untuk mengurangi disparitas antar wilayah.
7. Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim: Menggambarkan seberapa rentan wilayah tersebut terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
8. Inklusi Ekonomi: Menyoroti partisipasi semua lapisan masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan.

c. Indeks Ketahanan Lingkungan

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) mengevaluasi kemampuan suatu wilayah, terutama desa, dalam merawat dan mempertahankan lingkungan alaminya. Berikut adalah faktor utama yang dipertimbangkan dalam mengukur indeks ketahanan lingkungan pada indeks desa membangun:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Ini mencakup upaya untuk menjaga sumber daya alam seperti hutan, air tanah, dan keanekaragaman hayati dengan strategi konservasi yang berkelanjutan.

2. Pengelolaan Limbah: Strategi pengelolaan limbah yang efektif diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan melalui manajemen sampah padat, cair, dan gas.
3. Kualitas Udara: Fokus pada penilaian kualitas udara, termasuk tingkat polusi dan emisi gas rumah kaca, baik di udara terbuka maupun di dalam ruangan.
4. Pemanfaatan Energi Terbarukan: Transisi menuju energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
5. Praktik Pertanian Berkelanjutan: Penerapan praktik pertanian yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, seperti pemupukan organik dan rotasi tanaman.
6. Manajemen Bencana Alam: Kemampuan dalam mengelola bencana alam, termasuk upaya mitigasi, persiapan, dan tanggapan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
7. Kesadaran Masyarakat: Edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan praktik yang berkelanjutan.

Penyusunan IDM didasarkan pada pemahaman bahwa pembangunan desa merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan/ekologi yang saling memperkuat untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Langkah-langkah metode penyusunan IDM sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan berdasarkan indikator-indikator yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi.
2. Skoring Indikator: Setiap indikator dinilai dengan skor dari 0 hingga 5, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan kondisi yang lebih baik atau lebih positif.

3. Transformasi Skor ke Indeks: Total skor indikator diubah menjadi indeks dengan rentang nilai 0 hingga 1 dengan rumus:

$$I_x = \frac{\sum_l^n Skor X}{n_x \times 5}$$

Dimana :

I_x = indeks

N = Jumlah indikator

4. Penghitungan Indeks Komposit: IDM dihitung sebagai rata-rata dari ketiga indeks komponen (IKS, IKE, dan IKL) dengan rumus:

$$IDM = \frac{(IKS + IKE + IKL)}{3}$$

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 menetapkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa. Dalam peraturan ini, desa diklasifikasikan ke dalam lima status berdasarkan tingkat kemajuan dan kemandiriannya:

1. Desa Mandiri (Desa Sembada): Desa yang sudah maju dengan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang baik.
2. Desa Maju (Desa Pra-Sembada): Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang cukup serta kemampuan untuk mengelolanya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang (Desa Madya): Desa yang berpotensi untuk menjadi desa maju, dengan sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang ada tetapi belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan.

4. Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya): Desa yang memiliki potensi sumber daya tetapi belum atau kurang mampu mengelolanya dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan belum optimal.
5. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama): Desa yang mengalami kerentanan akibat bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber dayanya dan mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Klasifikasi tersebut didasarkan pada Indeks Desa Membangun dengan skala nilai sebagai berikut:

1. Desa Mandiri: $IDM > 0,8155$
2. Desa Maju: $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
3. Desa Berkembang: $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Tertinggal: $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
5. Desa Sangat Tertinggal: $IDM \leq 0,4907$

Klasifikasi dalam Indeks Desa Membangun (IDM) membantu menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat untuk pembangunan dan pemberdayaan desa sesuai dengan tingkat kemandirian dan kemajuannya. Indikator dalam indeks ini didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan, di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi saling mendukung, sehingga desa dapat mempertahankan potensinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan aktivitas pembangunan desa harus berlandaskan nilai-nilai lokal, budaya, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mencapai pemerataan dan keadilan.

IDM mencerminkan perkembangan kemandirian desa sesuai dengan implementasi Undang-Undang Desa, didukung oleh Dana Desa dan Pendamping Desa. Indeks ini membantu pemerintah mengarahkan kebijakan dengan lebih tepat melalui intervensi yang sesuai, partisipasi masyarakat, dan karakteristik wilayah seperti

tipologi dan modal sosial. Dengan demikian, intervensi pembangunan dapat lebih efektif dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan desa.

2.2. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, tujuan disalurnkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (djp.kemenkeu.go.id)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 mengatur tentang mekanisme pengalokasian dana desa kepada setiap desa di Indonesia untuk mendorong pembangunan yang merata di tingkat desa. Alokasi dana desa terdiri atas Alokasi Dasar yaitu alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa sebesar 65% dari anggaran dana desa, Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebesar 1% dari anggaran dana desa, Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik sebesar 4% dari anggaran dana desa, dan Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 30% dari anggaran dana desa.

Sesuai pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 dijelaskan Alokasi Formula dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
2. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
3. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
4. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40%(empat puluh persen).

Besaran Alokasi Formula dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AFDesa = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z3)\} \times AF$$

Keterangan:

AFDesa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG) setiap Desa terhadap total IKG

AF = Alokasi Formula Nasional

Penggunaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 berfokus pada berbagai prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat pemerintahan desa. Dana Desa harus digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang disusun melalui proses partisipatif dan melibatkan masyarakat desa. Kegiatan yang didanai oleh Dana Desa mencakup pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kegiatan lainnya yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

a. Pembangunan Infrastruktur Desa

Salah satu prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, irigasi, sanitasi, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memudahkan mobilitas, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya infrastruktur yang baik, desa dapat lebih mudah mengembangkan potensi lokalnya dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa juga digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat desa dalam berbagai aspek. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, sehingga mengurangi angka kemiskinan di desa.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Selain pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, Dana Desa juga dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi pemerintahan desa yang lebih baik. Misalnya, dana dapat digunakan untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

d. Kegiatan Lainnya yang Mendukung Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa tidak hanya terbatas pada infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan publik, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan lain yang mendukung pembangunan desa secara

keseluruhan. Ini termasuk kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan ketahanan pangan, serta kegiatan budaya dan sosial yang memperkuat kohesi dan kerjasama antar warga desa. Dengan adanya fleksibilitas dalam penggunaan Dana Desa, pemerintah desa dapat menyesuaikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing desa, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

2.3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan komponen penting dalam struktur keuangan desa yang diatur oleh pemerintah Indonesia. ADD diambil dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan bagian dari transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Setelah diperoleh nilai ADD dari dana perimbangan yang telah dikurangi DAK, pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana tersebut ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa dan memperkuat pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Proses pengalokasian ADD ke dalam APBD harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana yang dialokasikan ke dalam APBD disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD), yang merupakan rekening resmi pemerintah desa untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Proses penyaluran ini harus dilakukan dengan cermat agar dana tersebut benar-benar sampai ke desa dan digunakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun oleh pemerintah desa.

Penggunaan ADD harus sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat desa. APBDes mencakup program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Pengawasan penggunaan ADD dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan efisien, serta menghindari penyalahgunaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan ADD, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat lebih mandiri dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta mengatasi berbagai masalah dengan pengelolaan yang baik dan transparan, menjadikan ADD instrumen efektif untuk pembangunan desa berkelanjutan dan inklusif.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk memperkuat struktur keuangan desa guna mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja bagi pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan yang didanai oleh ADD. Berikut tujuan alokasi dana desa:

- a. Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan Desa: ADD bertujuan untuk menyediakan sumber daya keuangan yang cukup bagi desa agar dapat melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik. Ini termasuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan lainnya yang menjadi tanggung jawab desa. Dengan adanya ADD, desa diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

- b. Mendorong Pembangunan Desa: ADD digunakan untuk membiayai program pembangunan desa yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa. Peraturan ini memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan desa yang berkelanjutan.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan: Salah satu tujuan ADD adalah untuk membiayai kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya ADD, desa dapat melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik serta pelestarian budaya lokal.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa: ADD bertujuan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat desa yang fokus pada peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi lokal.
- e. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Tujuan utama dari alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan yang didanai oleh ADD, seperti pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya ADD, diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat desa.
- f. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menggarisbawahi pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. ADD harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan yang baik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.

- g. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa: ADD juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga program dan kegiatan yang didanai oleh ADD benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat ini juga penting untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.
- h. Mengurangi Kesenjangan Antar Desa: Dengan adanya ADD, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa. Desa-desa yang lebih tertinggal diharapkan dapat mengejar ketertinggalan melalui dana yang dialokasikan secara proporsional dan berdasarkan kebutuhan. Ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh desa di Indonesia.

2.4. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (BKK DAIS Kalurahan)

UU Nomor 13 Tahun 2012 dikeluarkan sebagai wujud pengakuan negara terhadap status khusus DIY sebagai daerah istimewa. DIY memiliki kekhususan dalam segi pemerintahan, yaitu memiliki Gubernur yang diangkat oleh Presiden dan memiliki hak untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tata pemerintahan yang demokratis.

Dalam UU tersebut, salah satu pengaturan utama adalah mengenai dana keistimewaan yang diberikan kepada DIY. Dana keistimewaan ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan DIY secara lebih mandiri, sesuai dengan

prinsip otonomi khusus. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan secara khusus untuk DIY setiap tahunnya.

Dana keistimewaan DIY digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan serta pemeliharaan keistimewaan DIY sebagai entitas hukum yang unik di Indonesia. Berikut pemanfaatan dana keistimewaan:

- a. **Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik:** Dana keistimewaan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, dana ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi.
- b. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk program-program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat DIY, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi lokal yang potensial.
- c. **Pelestarian Budaya dan Lingkungan:** DIY memiliki kekayaan budaya dan lingkungan yang perlu dilestarikan. Dana keistimewaan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian budaya lokal dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah DIY.

Sebagai regulasi pelaksana UU Keistimewaan meliputi Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 163 tahun 2023 tentang Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perdais No.2 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur, Perdais No.1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten, Perdais No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten, Perdais No.3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, dan Perdais

No.1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kalurahan yang merupakan sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan penugasan urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Cakupan urusan keistimewaan bidang kelembagaan kepada pemerintah kalurahan meliputi:

- a. Penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur Kalurahan.
- b. Penyusunan Peraturan Kalurahan untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan.
- c. Pengelolaan sumber daya manusia.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan keistimewaan kelembagaan.
- e. Peningkatan budaya pemerintahan.

Kedudukan Kalurahan tidak dapat dipisahkan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan urusan keistimewaan oleh Kalurahan dilakukan melalui penugasan urusan keistimewaan. Hal ini telah selaras dengan “sumber” kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu sumber kewenangan Kalurahan berasal dari penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi. Penugasan ini kembali ditajamkan melalui Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Pengaturan penugasan kepada Pemerintah Kalurahan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Selain penugasan urusan keistimewaan bidang kelembagaan, Peraturan Gubernur tersebut juga mengamanatkan penugasan keistimewaan pada 3 (tiga) urusan bidang lainnya yaitu urusan pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan.

BKK DAIS Kalurahan yang dialokasikan kepada Pemerintah Kalurahan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat diurus kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. BKK DAIS Kalurahan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur, termasuk Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Balai Budaya, Arsitektur Yogyakarta, Cagar Budaya, Warisan Budaya tak Benda, Karangkepek, pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis, penerapan administrasi tanah desa, penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan, dan Budaya Maritim. Semua ini sesuai dengan penugasan urusan Keistimewaan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.

Upaya serius Pemerintah Daerah DIY dalam percepatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan keberdayaan masyarakat kalurahan dalam rangka

mewujudkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan dengan terbitnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat penting dalam penulisan tesis ini, berfungsi sebagai pembanding dan referensi untuk penelitian saat ini. Penelitian sebelumnya membentuk dasar pengetahuan yang diperlukan untuk memahami konsep dan teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Melalui penelitian sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi celah pengetahuan dan memperluas wawasan metodologis untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga memberikan dukungan teoritis untuk hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

- a. Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara, Arina, A. I., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021).

Dalam kajian pustaka ini, Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak dari dana desa dan alokasi dana desa terhadap perkembangan indeks desa membangun di wilayah tersebut.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian lebih terhadap desa sebagai entitas hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, dana desa menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan dapat mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta kantor desa di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini mencatat bahwa anggaran dana desa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan

peningkatan signifikan pada tahun 2016-2017, penurunan pada tahun 2018, dan kembali meningkat pada tahun 2019. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan 60% pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, terdapat juga temuan bahwa penggunaan dana desa tidak selalu tepat sasaran, di mana prioritas lebih diberikan kepada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan dana desa agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

- b. Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa, Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022).

Penelitian mengenai pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gowa memberikan wawasan penting tentang peran dana pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Dalam konteks ini, Dana Desa diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Dana Desa yang digunakan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan PADes memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam BUMDes dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Sebaliknya, Alokasi Dana Desa (ADD) tidak menunjukkan

pengaruh signifikan terhadap IDM, yang mungkin disebabkan oleh dominasi belanja pegawai dalam penggunaan ADD, sehingga mengurangi efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Studi ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan pembangunan desa. Selain itu, PADes berperan penting dalam memberikan keleluasaan anggaran dan meningkatkan kemandirian fiskal desa, sehingga memungkinkan pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih strategis.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya peningkatan tata kelola BUMDes, pelatihan untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan, serta optimalisasi sumber pendapatan desa. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak Dana Desa, ADD, dan PADes terhadap IDM dengan memperluas objek dan rentang waktu penelitian.

- c. Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur, Halim, A. R., & Taryani, A. (2023).

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan, kondisi geografis, dan kearifan lokal. Sejak dianggarkan pertama kali dalam APBN pada tahun 2015, dana desa telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan desa, yang diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kajian pustaka ini, penelitian menganalisis dampak pengelolaan dana desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IDM merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pembangunan dan kesejahteraan di desa. Penelitian ini berfokus pada tiga dimensi kinerja pengelolaan dana desa, yaitu persentase penyaluran, persentase penyerapan, dan kecepatan penyaluran dana. Penelitian ini juga mempertimbangkan lag waktu, mengingat dampak dari pengelolaan dana desa tidak selalu langsung terlihat, melainkan dapat memerlukan waktu untuk berpengaruh terhadap IDM.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan model efek tetap. Data yang dianalisis mencakup dana desa dari tahun 2017 hingga 2021 dan IDM dari tahun 2020 hingga 2022 pada 3.026 desa di Nusa Tenggara Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase penyaluran dana desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM. Sebaliknya, persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa, dengan lag waktu dua dan tiga tahun, menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IDM. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa baru dapat terlihat setelah beberapa tahun.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa untuk mengoptimalkan penyaluran dan penggunaan dana desa, serta mempercepat proses penyaluran demi kemajuan desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang baik dan tepat waktu dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan pembangunan yang lebih merata di Indonesia.

- d. Peran Dana Desa Dalam Peningkatan Ketahanan Lingkungan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hariwibowo, I. N., & Wardhana, D. Y. (2023).

Dalam kajian pustaka ini, memberikan wawasan yang mendalam mengenai pemanfaatan dana desa dalam konteks pembangunan ketahanan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai daerah dengan tingkat penyaluran dana desa tertinggi di Indonesia pada tahun 2022.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 3.71% pada tahun 2022, perhatian terhadap aspek lingkungan dalam pengelolaan dana desa masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana desa telah berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi, dampaknya terhadap ketahanan lingkungan belum optimal. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan antara pemanfaatan dana desa dan peningkatan pembangunan desa, namun penelitian yang secara khusus mengkaji dampak dana desa terhadap ketahanan lingkungan masih terbatas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan analisis data sekunder, yang mencakup 392 desa di Provinsi DIY. Data yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Desa menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa bervariasi antar kabupaten, dengan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan realisasi anggaran dan nilai IKL terendah. Penelitian ini juga menggunakan metode clustering dengan aplikasi Orange untuk mengelompokkan desa berdasarkan pemanfaatan dana desa dan ketahanan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak desa di Kabupaten Kulon Progo masuk dalam kategori dengan realisasi anggaran rendah dan nilai IKL rendah, yang mengindikasikan bahwa dana desa belum dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan ketahanan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya perhatian lebih terhadap aspek lingkungan dalam

pengelolaan dana desa agar dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan utuh.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran dana desa dalam konteks ketahanan lingkungan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memanfaatkan dana desa demi peningkatan ketahanan lingkungan di daerah pedesaan.

- e. Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Konsep Blue Economy Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Sumatera Utara, Rangkuti, S. F., Sukardi, & M. Syafii. (2024).

Dalam kajian pustaka ini, penelitian mengenai pengaruh Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, menjadi fokus utama. Penelitian ini berlandaskan pada kebijakan penggunaan Dana Desa yang diatur dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan penguatan masyarakat.

Salah satu alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hubungan antar variabel secara lebih komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa IKS, IKE, dan IKL secara simultan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan IKS memiliki pengaruh yang paling signifikan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa ketahanan sosial merupakan faktor kunci dalam menciptakan kondisi yang mendukung

kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan dan ekonomi.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Program-program seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengembangan energi terbarukan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan lingkungan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana kebijakan dan program pembangunan desa dapat diintegrasikan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang lebih baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini juga menggarisbawahi peran penting pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan yang berfokus pada pembangunan desa melalui Dana Desa, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
1	Arina, A. I., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian : - Dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks desa	Persamaan : - Menganalisis pengaruh anggaran dana desa, alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun. Perbedaan : - Penelitian ini menambahkan pengaruh

No	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
	Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.22 No.3, 22-41.	membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. - Alokasi dana desa juga berpengaruh signifikan terhadap indeks desa membangun di wilayah tersebut. - Secara simultan, dana desa dan alokasi dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara.	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan di Kalurahan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Gunungkidul. - Penelitian terdahulu menganalisis di Kabupaten Minahasa Tenggara, penelitian ini menganalisis di Kabupaten Gunungkidul.
2	Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 48, No. 1, Juni 2022, 17-36.	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Hasil penelitian: menunjukkan pengaruh positif variabel independen (DDBUM, ADD, dan PADes) terhadap variabel dependen (IDM).	Persamaan : - Menganalisis pengaruh anggaran dana desa, alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun. - Menggunakan metode regresi data panel. Perbedaan : - Penelitian ini menambahkan pengaruh BKK Dana Keistimewaan di Kalurahan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Gunungkidul. - Penelitian terdahulu menganalisis di Kabupaten Gowa, penelitian ini menganalisis di Kabupaten Gunungkidul.
3	Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel mempertimbang-	Persamaan : - Menggunakan metode regresi data panel.

No	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
	Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Volume 4, Nomor 1, 51-71.	kan efek tetap (fixed effect) dan robust standard error. Klasterisasi dilakukan menggunakan kode unik desa (desaid) disertai dengan dummy tahun. Hasil Penelitian: - Pengaruh Persentase Penyaluran Dana Desa: Tidak signifikan terhadap IDM. - Pengaruh Persentase Penyerapan Dana Desa: Signifikan terhadap IDM dengan lag waktu satu hingga tiga tahun.	- Pengaruh variabel dana desa terhadap Indeks desa membangun. Perbedaan : - Penelitian ini menambahkan pengaruh alokasi dana desa dan BKK DAIS di Kalrahan terhadap IDM di Kabupaten Gunungkidul. - Penelitian terdahulu menganalisis di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penelitian ini menganalisis di Kabupaten Gunungkidul.
4	Hariwibowo, I. N., & Wardhana, D. Y. (2023). Peran Dana Desa Dalam Peningkatan Ketahanan Lingkungan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosiding SENAPAS, Vol. 1, No. 1, Juni 2023, 140-146.	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan clustering dengan algoritma K-Means menggunakan aplikasi Orange 3.3.5. Hasil penelitian: penggunaan DD untuk meningkatkan pembangunan desa dalam aspek ketahanan lingkungan di Provinsi DIY. Penelitian ini memberikan gambaran efektivitas pemanfaatan dana desa untuk pembangunan lingkungan desa.	Persamaan : Menganalisis pengaruh dana desa terhadap indeks desa membangun. Perbedaan : - Penelitian ini menambahkan pengaruh Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan di Kalrahan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Gunungkidul.
5	Rangkuti, S. F., Sukardi, & M. Syafii. (2024). Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel untuk menganalisis hubungan	Persamaan : Menganalisis pengaruh dana desa terhadap indeks desa membangun.

No	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
	Konsep Blue Economy Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Sumatera Utara. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 8 Nomor 1, Januari 2024, 983-995.	antar variabel yang telah ditentukan. Tiga model analisis yang diuji adalah common, fixed, dan random effect. Hasil Penelitian: - Pengaruh Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa: Terdapat pengaruh positif Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara. - Pengaruh Variabel Indeks Pembangunan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu IKS, IKE, dan IKL, mampu menjelaskan sebesar 41,99% terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat. Sisanya 58,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi. - Pengaruh Indeks Pembangunan Desa Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara: Gambaran indeks pembangunan desa	Perbedaan : - Penelitian ini menambahkan pengaruh Alokasi dana desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan di Kalrahan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Gunungkidul. - Penelitian terdahulu membahas spesifik peran dana desa terhadap indeks utama pembentuk indeks desa membangun.

No	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
		menunjukkan bahwa Kabupaten Batu Bara memiliki indeks tertinggi, sementara Kabupaten Nias Selatan memiliki indeks terendah.	

2.6. Kerangka Pikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pikiran

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai kebutuhan, dengan dana desa yang bersumber dari APBN untuk mendanai berbagai program desa.

Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh kabupaten/kota, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. ADD bertujuan mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera dengan memanfaatkan potensi lokal.

UU Nomor 13 Tahun 2012 mengakui status khusus DIY sebagai daerah istimewa, dengan kekhususan dalam pemerintahan yang mencakup pengangkatan Gubernur oleh Presiden dan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dana keistimewaan DIY, bersumber dari APBN dan dialokasikan khusus setiap tahun, mendukung berbagai program strategis untuk pengembangan dan pelestarian DIY. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 menjadi gambaran upaya serius Pemerintah Daerah DIY dalam percepatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan keberdayaan masyarakat kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan melalui Dana Keistimewaan DIY.

2.7. Pengembangan Hipotesis

Proses perumusan pernyataan sementara untuk pengujian hubungan antara dua atau lebih variabel merupakan proses pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis didasarkan pada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu, alokasi dana pusat memiliki pengaruh terhadap IDM. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Dana Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai kebutuhan, dengan dana desa yang bersumber dari APBN untuk mendanai berbagai program desa. Dana ini dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa dalam APBN setiap tahun, memastikan program berbasis desa berjalan secara merata dan adil. Untuk pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi jika laporan penggunaan dana desa terlambat atau tidak sesuai. Prioritas penggunaan dana desa kini beralih dari pembangunan infrastruktur ke pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi desa yang infrastrukturnya telah memadai. Fokus utama adalah

mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM di desa. Penelitian ini menduga bahwa dana desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul.

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perdesaan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa terpisah dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh kabupaten/kota, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa melibatkan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan program kerja sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. ADD bertujuan mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera dengan memanfaatkan potensi lokal. Penelitian ini menduga bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul.

UU Nomor 13 Tahun 2012 mengakui status khusus DIY sebagai daerah istimewa, dengan kekhususan dalam pemerintahan yang mencakup pengangkatan Gubernur oleh Presiden dan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dana keistimewaan DIY, bersumber dari APBN dan dialokasikan khusus setiap tahun, mendukung berbagai program strategis untuk pengembangan dan pelestarian DIY. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Regulasi terkait pengelolaan dana ini termasuk PMK Nomor 163 tahun 2023 dan berbagai Perdais. BKK DAIS Kalurahan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di DIY, mendukung kebijakan strategis Gubernur seperti Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan lainnya. Penelitian ini menduga bahwa BKK

DAIS Kalurahan berpengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul.

2.8. Pernyataan Hipotesis

Pernyataan hipotesis dinyatakan dengan Hipotesis nol (H_0) yang merupakan paramater yang akan diuji atau dengan kata lain Hipotesis nol (H_0) merupakan nilai sementara atau dugaan sementara. Pengujian statistik berdasarkan pernyataan hipotesis ini dapat ditolak atau diterima (gagal menolak).

1. Hipotesis nol (H_0) diterima, artinya secara statistik tidak terdapat perbedaan antara variabel yang diperbandingkan atau kedua variabel yang dibanding sama dengan 0.
2. Hipotesis nol (H_0) ditolak, artinya secara statistik terdapat perbedaan antara variabel yang diperbandingkan atau variabel satu lebih besar/kecil dibanding variabel lain.

Berdasarkan pengembangan hipotesis maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pernyataan Hipotesis Dana Desa terhadap IDM

H_0 : Tidak terdapat pengaruh secara positif Dana Desa terhadap IDM

H_a : Terdapat pengaruh secara positif Dana Desa terhadap IDM

2. Pernyataan Hipotesis ADD terhadap IDM

H_0 : Tidak terdapat pengaruh secara positif ADD terhadap IDM

H_a : Terdapat pengaruh secara positif ADD terhadap IDM

3. Pernyataan Hipotesis BKK DAIS Kalurahan terhadap IDM

H_0 : Tidak terdapat pengaruh secara positif BKK DAIS Kalurahan terhadap IDM

H_a : Terdapat pengaruh secara positif BKK DAIS Kalurahan terhadap IDM

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, Paniradya Kaistimewan DIY selaku Perangkat Daerah penyusun kebijakan dan perencanaan urusan keistimewaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Data sekunder yang digunakan yaitu data dana desa, alokasi dana desa, alokasi dana keistimewaan kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan data indeks desa membangun tahun 2019 s.d 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel. Data panel merupakan data gabungan dari time series dan data cross section, dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu dari tahun 2019 s.d 2023 di 144 desa Kabupaten Gunungkidul.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.2.1. Variabel *dependen* (terikat).

Variabel *dependen* merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas. Variabel *dependen* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks desa membangun di 144 desa Kabupaten Gunungkidul pada kurun waktu 2019 s.d 2023 yang diperoleh dari Kemendes PDTT.

3.2.2. Variabel *independen* (bebas).

Variabel *independen* merupakan variabel yang memengaruhi atau menjelaskan variabel *dependen*. Berikut variabel *independen* yang digunakan dalam penelitian ini :

3.2.2.a. Dana Desa (DD)

Dana Desa merupakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung desa menjadi kuat, mandiri, dan sejahtera. Dana ini digunakan untuk pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan, dengan

pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 menetapkan mekanisme pengalokasian dana desa, termasuk Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Dana Desa harus digunakan sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan. Penggunaan dana mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan kegiatan lain yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai, program pemberdayaan, dan peningkatan layanan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan data DD dari tahun 2019 s.d 2023 di 144 desa Kabupaten Gunungkidul. Data DD pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3.2.2.b. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah komponen penting dalam struktur keuangan desa yang diambil dari dana perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini dialokasikan ke dalam APBD dan disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk mendukung pembangunan desa dan pelayanan publik. Penggunaan ADD harus sesuai dengan APBDes yang disusun secara partisipatif, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pengawasan dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. ADD bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, mendorong pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menekankan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan antar desa. Penelitian ini menggunakan data ADD dari tahun

2019 s.d 2023 di 144 desa Kabupaten Gunungkidul. Data ADD pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3.2.2.c. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (BKK DAIS Kal)

UU Nomor 13 Tahun 2012 mengakui status khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan pemerintahannya yang memiliki Gubernur yang diangkat oleh Presiden dan hak otonomi sendiri. UU ini mengatur dana keistimewaan dari APBN untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan DIY secara mandiri. Dana ini digunakan untuk infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Regulasi pelaksana mencakup berbagai peraturan, termasuk PMK Nomor 163 Tahun 2023 dan beberapa Perda. Dana keistimewaan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan kalurahan dan mendukung kebijakan strategis Gubernur sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan Alokasi BKK DAIS Kal dari tahun 2021 s.d 2023 di 144 desa Kabupaten Gunungkidul. Data BKK DAIS Kal pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Paniradya Kaistimewan DIY.

Berdasarkan penjelasan terkait variabel yang digunakan maka definisi operasional penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Satuan	Definisi
Indeks Desa Membangun	IDM	index	Indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa. Data bersumber dari laman https://idm.kemendes.go.id
Dana Desa	DD	rupiah (Rp)	Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa. Data bersumber

Variabel	Simbol	Satuan	Definisi
			dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Alokasi Dana Desa	ADD	rupiah (Rp)	Dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk mendukung pembangunan desa dan pelayanan publik. Data bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Bantuan Keuangan Khusus Dana Kesitimewaan Kalurahan	BKK DAIS Kal	rupiah (Rp)	Dana keistimewaan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan Desa (Kalurahan) dan mendukung kebijakan strategis Gubernur. Data bersumber dari Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3. Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan metode regresi data panel (*Pooled data*). Metode ini merupakan data gabungan antara data lintas waktu (*time series*) 2019-2023 dan data lintas-individu (*cross section*) 144 desa menggunakan bantuan Eviews 12.

Analisis panel data adalah subyek dari salah satu bentuk yang cukup aktif dan inovatif dalam literatur ekonometrik. Hal ini dikarenakan metode analisis data panel menyediakan informasi yang cukup akurat untuk perkembangan teknik estimasi dan hasil teori.

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode regresi data panel untuk menguji apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Data panel merupakan kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, data panel dapat meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*). Selain itu, penggunaan data panel membantu mengatasi masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*) karena memanfaatkan informasi yang berasal dari kombinasi data *time series* dan *cross section* (Widarjono, 2018). Berikut adalah model persamaan regresi data panel yang diterapkan dalam penelitian ini:

$$IDM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 ADD_{it} + \beta_3 BKKDAISKal_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

IDM	= Indeks Desa Membangun (indeks)
DD	= Dana Desa (rupiah)
ADD	= Alokasi Dana Desa (rupiah)
BKKDAISKal	= Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (rupiah)
Bo	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien Regresi
E	= Variabel di luar model
I	= entitas ke-i
T	= periode ke-t

3.4. Pendekatan Model Regresi Data Panel

Teknik analisis data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan metode *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*.

3.4.1. Pendekatan Regresi Data Panel dengan *Common Effect Model*

Pendekatan model *Common Effect* adalah metode estimasi paling sederhana, di mana data panel dianalisis dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section* secara langsung (Widarjono, 2018). Pendekatan ini hanya menyatukan kedua jenis data tanpa memperhitungkan variasi antar waktu maupun perbedaan antar individu.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

I	= Banyaknya observasi (1, 2, ..., n)
T	= Banyaknya waktu (1, 2, ... , t)
E	= residual

3.4.2. Pendekatan Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect Model*

Pendekatan model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan *slope* antar individu adalah tetap (sama). Teknik

ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan *intersep* antar individu. Model estimasi ini sering disebut teknik *Last Squares Dummy Variables* (LSDV). Berikut model *Fixed Effect* dengan teknik variabel dummy (Widarjono, 2018):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_k X_{it} + \beta_k D_i + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

- D = Variabel dummy
- I = Banyaknya observasi (1, 2, ..., n)
- T = Banyaknya waktu (1, 2, ... , t)
- E = residual

3.4.3. Pendekatan Regresi Data Panel dengan *Random Effect Model*

Pendekatan yang dipakai dalam *Random Effect* mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan *intersep*, yang mana *intersep* tersebut adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*. Berikut model *Random Effect* (Widarjono, 2018):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_k X_{it} + (\varepsilon_{it} + \mu_{it})$$

Keterangan :

- I = Banyaknya observasi (1, 2, ..., n)
- T = Banyaknya waktu (1, 2, ... , t)
- n x t = Banyaknya data panel
- e = residual

3.5. Uji Kesesuaian Model

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik estimasi dengan model data panel, maka digunakan Uji Lagrange Multiplier, Uji Chow dan Uji Hausman:

3.5.1. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi *Random Effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_i^n = 1 [\sum_t^T = 1 e_{it}]}{\sum_i^n = 1 [\sum_t^T = 1 e_{it}^2]} - 1 \right] 2$$

Dimana :

n = Jumlah individu

T = Jumlah periode waktu

e = Residual metode *Common Effect* (OLS)

Hipotesis yang digunakan adalah :

H₀ : Model *Common Effect*

H₁ : Model *Random Effect*

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-squares* maka kita menolak hipotesis *null*, yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah model *Random Effect* dari pada model *Common Effect*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis *null*, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah model *Common Effect* bukan model *Random Effect*. (Utari, 2017)

Uji LM tidak digunakan apabila pada uji Chow dan uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah model *Fixed Effect*. Uji LM dipakai manakala pada uji Chow menunjukkan model yang dipakai adalah model *Common Effect*, sedangkan pada uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah model *Random Effect*. Maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk menentukan model *Common Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat. (Utari, 2017)

3.5.2. Uji Chow

Uji Chow adalah untuk menentukan uji mana di antara kedua metode yakni metode *common effect* dan metode *fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam uji chow ini sebagai berikut :

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol (H_0) adalah dengan menggunakan F-statistik, seperti rumus berikut: (Mahulete. 2016).

$$CHOW = \frac{(ESS1 - ESS2)/(N - 1)}{(ESS2)/(NT - N - K)}$$

Dimana :

ESS1 : Residual *Sun Square* hasil perdugaan model *fixed effect*

ESS2 : Residual *Sun Square* hasil perdugaan model *pooled last square*

N : Jumlah Data *Cross Section*

T : Jumlah Data *Time Series*

K : Jumlah Variabel Penjelas

Statistik chow mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas (N-1, NT-N-K). Jika nilai chow statistik (F-statistik) > F-tabel, maka H_1 diterima, maka yang terpilih adalah model *fixed effect*, begitu pula sebaliknya. (Utari, 2017).

3.5.3. Uji Hausman

Uji Hausman yaitu untuk menentukan uji mana diantara kedua model *random effect* dan model *fixed effect* yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel.

Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut :

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Dengan rumus sebagai berikut :

$$m = (\beta - b)(M_0 - M_1)^{-1}(\beta - b) \sim X^2(K)$$

Dimana β adalah vektor untuk statistik variabel *fixed effect*, b adalah vektor statistik variabel *random effect*, M_0 adalah matrik kovarians untuk dugaan model *fixed*

effect dan M_1 adalah matrik kovarians untuk dugaan model *random effect*. (Utari, 2017).

3.6. Pengujian Hipotesis

Agar dapat menghasilkan persamaan regresi yang baik, maka harus dilakukan uji statistik. Uji statistik merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji diterima atau ditolaknya (secara statistik) hasil hipotesis nol (H_0) dari sampel. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada

3.6.1. Koefisien Determinasi R-Squared (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan dari regresi data panel, yaitu merupakan proporsi presentase sumbangan X terhadap variasi naik turunnya Y yang dilihat menggunakan EViews. Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Dimana :

ESS : Jumlah kuadrat dari regresi

TSS : Total jumlah kuadrat

Besarnya nilai R^2 berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) yaitu $0 < R^2 < 1$. Jika R^2 semakin mendekati 1 (satu), maka model tersebut baik dan pengaruh antara variabel terkait Y semakin kuat (erat hubungannya). (Utari, 2017).

3.6.2. Uji t

Uji t yaitu untuk menguji hubungan regresi secara parsial, dalam uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel terikat dengan menggunakan EViews. Uji t menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, dimana untuk kekuatan pada uji t adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel terkait.

H_1 : Ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel terkait.

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} jika :

1. $t_{hitung} > t_{tabel}$: maka H_0 ditolak H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat (Y) adalah signifikan.
2. $t_{hitung} < t_{tabel}$: maka H_0 diterima H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan. (Utari, 2017)

3.6.3. Uji F

Uji F statistik yaitu menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dilihat dengan menggunakan EViews. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Variabel bebas tidak memiliki pengaruh dengan variabel terikat

H_1 : Ada pengaruh secara serentak antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dengan kriteria :

1. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$: maka H_0 ditolak H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel terikat (Y) adalah signifikan.
2. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$: maka H_0 diterima H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan. (Utari, 2017).

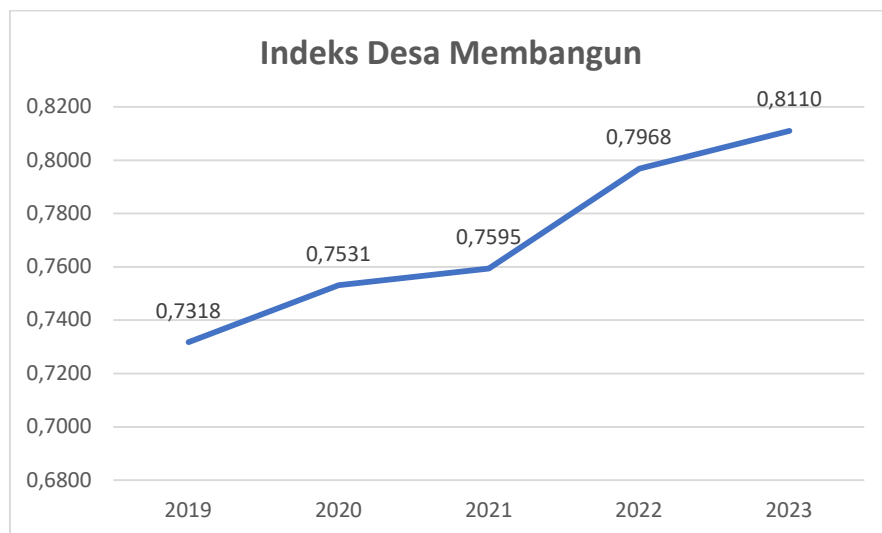
BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun mencerminkan perkembangan kemandirian desa sesuai dengan implementasi Undang-Undang Desa. Indeks ini membantu pemerintah mengarahkan kebijakan dengan lebih tepat melalui intervensi yang sesuai, partisipasi masyarakat, dan karakteristik wilayah seperti tipologi dan modal sosial. Dengan demikian, intervensi pembangunan dapat lebih efektif dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan desa.



Gambar : 4.1
Grafik Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gunungkidul selama periode 2019-2023 menunjukkan tren yang positif dan konsisten. Grafik ini mencerminkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pembangunan desa, dengan peningkatan IDM yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa desa-desa

di Kabupaten Gunungkidul terus bertransformasi menuju desa yang lebih maju dan mandiri dalam berbagai aspek pembangunan.

Pada tahun 2019, IDM berada di angka 0,7318, menunjukkan bahwa desa-desa masih berada dalam fase perkembangan. Pada tahun berikutnya, 2020, indeks naik menjadi 0,7531, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Meski peningkatan pada tahun 2021 hanya sedikit, yakni mencapai 0,7595, tren positif ini terus berlanjut, mengindikasikan pengembangan yang stabil di tingkat desa.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan IDM melonjak ke 0,7968, yang kemungkinan disebabkan oleh program-program pembangunan yang lebih intensif atau pengelolaan dana desa yang lebih optimal. Pada 2023, IDM mencapai angka tertinggi, yakni 0,8110, menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berkelanjutan tetapi juga semakin membawa desa-desa di Kabupaten Gunungkidul ke arah yang lebih mandiri dan maju.

Data IDM 144 desa di Kabupaten Gunungkidul pada periode tahun 2019-2020 menunjukkan pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 25 desa mengalami penurunan IDM dibanding tahun 2019, terbesar di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari sebesar -0,0618 dari tahun 2019 sebesar 0,7289 dan tahun 2020 sebesar 0,6671. Pada tahun 2020 terdapat 2 Desa tetap dan 117 Desa mengalami peningkatan IDM dibandingkan tahun 2019, peningkatan IDM terbesar di Desa Pengkok di Kecamatan Patuk sebesar 0,1859 dengan IDM di tahun 2019 sebesar 0,6195 dan pada tahun 2020 sebesar 0,8054. Pada periode 2020-2021, terdapat 11 desa mengalami penurunan, 81 desa tetap dan 52 desa meningkat. IDM Desa Wonosari di Kecamatan Wonosari mengalami penurunan terbesar sebesar -0,0667 dari tahun 2020 sebesar 0,9140 dan tahun 2021 sebesar 0,8473. Peningkatan IDM terbesar di Desa Selang Kecamatan Wonosari sebesar 0,1223 dari tahun 2020 sebesar 0,8098 dan tahun 2021 sebesar 0,9321.

Pada periode 2021-2022, terdapat 4 desa mengalami penurunan, 17 desa tetap dan 123 desa meningkat. IDM Desa Siraman di Kecamatan Wonosari mengalami penurunan terbesar sebesar -0,0192 dari tahun 2021 sebesar 0,8068 dan tahun 2022

sebesar 0,7876. Peningkatan IDM terbesar di Desa Genjahan Kecamatan Ponjong sebesar 0,2007 dari tahun 2021 sebesar 0,6963 dan tahun 2022 sebesar 0,8970. Dan pada periode 2022-2023, terdapat 43 desa mengalami penurunan, 7 desa tetap dan 94 desa meningkat. IDM Desa Girimulyo di Kecamatan Panggang mengalami penurunan terbesar sebesar -0,0948 dari tahun 2022 sebesar 0,8135 dan tahun 2023 sebesar 0,7187. Peningkatan IDM terbesar di Desa Gedangrejo Kecamatan Karangmojo sebesar 0,1911 dari tahun 2022 sebesar 0,7322 dan tahun 2023 sebesar 0,9233.

4.1.2. Dana Desa

Dana Desa merupakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung desa menjadi kuat, mandiri, dan sejahtera yang dipergunakan untuk pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.



Gambar : 4.2
Grafik Anggaran Dana Desa (DD) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Grafik tersebut secara umum menunjukkan alokasi Pagu Anggaran Dana Desa Kabupaten Gunungkidul selama periode tahun 2019 hingga 2023. Secara umum,

terdapat peningkatan jumlah dana desa setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran untuk desa-desa di Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2019, jumlah dana desa tercatat sekitar Rp136.052.137.000. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp142.022.003.000 atau meningkat 4,39% dari tahun 2019. Kenaikan ini dapat mencerminkan adanya penambahan program-program yang memerlukan dukungan anggaran lebih besar atau upaya peningkatan pembangunan desa.

Tahun 2021 dan 2022 juga menunjukkan angka yang relatif stabil dengan jumlah dana desa mencapai sekitar Rp 144 miliar. Meski ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kenaikannya tidak terlalu signifikan. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan stabilisasi anggaran, seperti perubahan kebijakan atau kebutuhan pembangunan yang cenderung tetap.

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023, di mana dana desa melonjak drastis menjadi Rp175.848.933.000 atau 21,81% dari tahun 2022. Lonjakan ini kemungkinan menunjukkan adanya kebutuhan yang jauh lebih besar dalam pembangunan desa, seperti penanggulangan dampak pandemi COVID-19, percepatan pembangunan infrastruktur, atau program-program baru yang diperkenalkan untuk memperkuat desa-desa di Gunungkidul.

Data Dana Desa Kabupaten Gunungkidul di 144 Desa pada periode tahun 2019-2020 menunjukkan pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 14 desa mengalami penurunan anggaran dana desa dibanding tahun 2019, terbesar di Desa Melikan Kecamatan Rongkop sebesar Rp.175.219.000 dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.154.112.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 978.893.000. Pada tahun 2020 terdapat 130 Desa mengalami peningkatan anggaran dana desa dibandingkan tahun 2019, peningkatan anggaran dana desa terbesar di Desa Planjan di Kecamatan Saptosari sebesar Rp. 228.725.000 dengan anggaran dana desa ditahun 2019 sebesar Rp. 1.113.731.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.342.456.000. Pada periode 2020-

2021, terdapat 82 desa mengalami penurunan dan 62 desa meningkat. Anggaran dana desa Desa Mertelu di Kecamatan Gedangsari mengalami penurunan terbesar sebesar Rp.208.438.000 dari tahun 2020 sebesar Rp.1.218.348.000 dan tahun 2021 sebesar Rp.1.009.910.000. Peningkatan anggaran dana desa terbesar di Desa Gari Kecamatan Wonosari sebesar Rp.371.081.000 dari tahun 2020 sebesar Rp.887.116.000 dan tahun 2021 sebesar Rp.1.258.197.000.

Pada periode 2021-2022, terdapat 70 desa mengalami penurunan, 74 desa tetap dan 123 desa meningkat. Anggaran dana desa Desa Giriasih di Kecamatan Purwosari mengalami penurunan terbesar sebesar Rp.406.017.000 dari tahun 2021 sebesar Rp.1.219.663.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.813.646.000. Peningkatan anggaran dana desa terbesar di Desa Selang Kecamatan Wonosari sebesar Rp.278.232.000 dari tahun 2021 sebesar Rp.766.393.000 dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.044.625.000. Dan pada periode 2022-2023, terdapat 17 desa mengalami penurunan dan 127 desa meningkat. Anggaran dana desa Desa Karangduwet di Kecamatan Paliyan mengalami penurunan terbesar sebesar Rp.272.409.000 dari tahun 2022 sebesar Rp.1.336.060.000 dan tahun 2023 sebesar Rp.1.063.651.000. Peningkatan anggaran dana desa terbesar di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari sebesar Rp. 1.145.570.000 dari tahun 2022 sebesar Rp.1.237.673.000 dan tahun 2023 sebesar Rp. 2.383.243.000.

Tabel 4.1
Lima Desa Terbesar dan Terkecil Pertumbuhan IDM dan DD Tahun 2019-2023

Kecamatan	Desa	2019		2023		Pertumbuhan 2019-2023	
		IDM	DD (ribu)	IDM	DD (ribu)	IDM	DD (ribu)
Wonosari	Wonosari	0,8854	772.920	0,8435	1.070.021	-0,0419	297.101
Karangmojo	Ngawis	0,7371	832.689	0,7165	1.021.823	-0,0206	189.134
Wonosari	Karangrejek	0,8703	826.160	0,8505	1.090.564	-0,0198	264.404
Panggang	Girimulyo	0,7321	1.071.637	0,7187	1.115.757	-0,0134	44.120
Panggang	Giriwungu	0,7186	951.179	0,7073	854.142	-0,0113	-97.037
Ponjong	Genjahan	0,6945	836.741	0,8856	1.435.322	0,1911	598.581
Purwosari	Giripurwo	0,6438	1.246.946	0,8411	2.038.499	0,1973	791.553
Playen	Logandeng	0,7410	843.308	0,9383	1.126.594	0,1973	283.286
Wonosari	Gari	0,6233	871.178	0,8271	1.300.200	0,2038	429.022
Karangmojo	Gedangrejo	0,7073	899.204	0,9233	1.161.766	0,2160	262.562

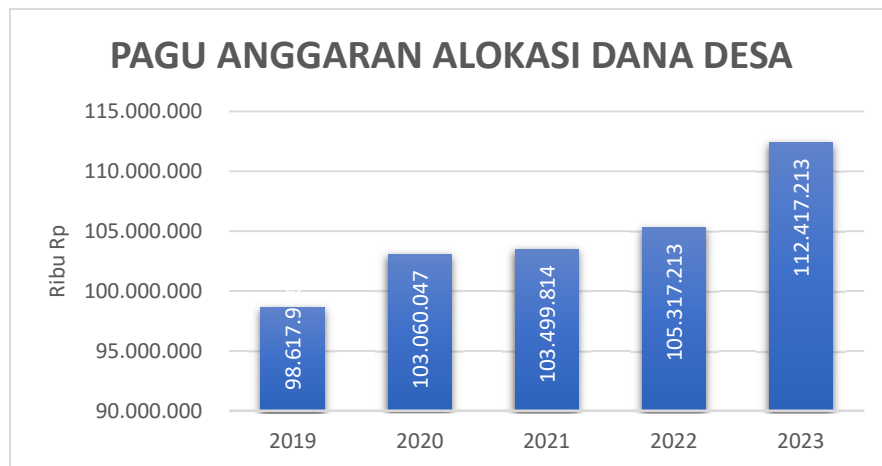
Dari tabel 4.1 terlihat bahwa pertumbuhan IDM dari tahun 2019 hingga 2023 tidak selalu sejalan dengan peningkatan alokasi DD. Meskipun anggaran DD terus bertambah selama periode tersebut, hal ini tidak berbanding lurus dengan kenaikan IDM. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan DD dalam mendorong peningkatan IDM. Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah dampak pandemi Covid-19.

Selama pandemi, pemerintah pusat menerapkan kebijakan khusus terkait prioritas penggunaan DD untuk mendukung penanganan pandemi. Kebijakan ini mengalihkan sebagian besar anggaran DD untuk program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, penyediaan fasilitas kesehatan, dan pendukung protokol kesehatan di tingkat desa. Akibatnya, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat berkurang signifikan. Fokus utama penggunaan anggaran selama masa pandemi lebih banyak diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat, sehingga pengaruhnya terhadap indikator IDM, seperti ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, menjadi tidak optimal.

Di sisi lain, kebijakan tersebut memang berhasil membantu desa-desa bertahan dalam menghadapi tantangan pandemi, seperti meningkatkan daya beli masyarakat dan memastikan akses layanan kesehatan dasar. Namun, pengalihan fokus ini menyebabkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan IDM tertunda atau tidak terlaksana. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun anggaran DD mengalami peningkatan, dampaknya terhadap pertumbuhan IDM tetap bergantung pada prioritas penggunaan dan kondisi eksternal yang memengaruhi implementasinya. Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan jangka panjang agar DD dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan IDM, terutama setelah dampak pandemi mulai berkurang.

4.1.3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, mendorong pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan desa dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan antar desa.



Gambar : 4.3
Grafik Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2023

Grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun terdapat fluktuasi, secara keseluruhan angka alokasi terus naik. Pada tahun 2019, alokasi ADD sebesar Rp98.617.956 ribu, yang meningkat menjadi Rp103.060.047.000 atau 4,50% pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp103.499.814.000 atau 0,43% dari tahun 2020, kemudian kenaikan tertinggi atau signifikan terjadi pada tahun 2023 dari Rp105.317.213.000 pada tahun 2022 menjadi Rp112.417.213.000 atau 6,74%.

Peningkatan alokasi dana desa menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa yang semakin besar diharapkan dapat digunakan untuk berbagai program

pembangunan, seperti infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan, sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk memberdayakan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Data Alokasi Dana Desa Kabupaten Gunungkidul di 144 Desa pada periode tahun 2019-2020 menunjukkan pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 57 desa mengalami penurunan anggaran alokasi dana desa dibanding tahun 2019, terbesar di Desa Serut Kecamatan Gedangsari sebesar Rp.162.110.300 dari tahun 2019 sebesar Rp. 801.439.500 dan tahun 2020 sebesar Rp. 639.329.200. Pada tahun 2020 terdapat 87 desa mengalami peningkatan anggaran alokasi dana desa dibandingkan tahun 2019, peningkatan anggaran alokasi dana desa terbesar di Desa Botodayaan di Kecamatan Rongkop sebesar Rp. 300.068.000 dengan anggaran alokasi dana desa di tahun 2019 sebesar Rp. 716.588.600 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.016.656.600. Pada periode 2020-2021, terdapat 72 desa mengalami penurunan dan 72 desa meningkat. Anggaran alokasi dana desa Desa Nglanggeran di Kecamatan Patuk mengalami penurunan terbesar sebesar Rp. 51.955.300 dari tahun 2020 sebesar Rp. 572.834.400 dan tahun 2021 sebesar Rp. 520.879.100. Peningkatan anggaran alokasi dana desa terbesar di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo sebesar Rp. 75.055.300 dari tahun 2020 sebesar Rp. 997.905.700 dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.072.961.000.

Pada periode 2021-2022, terdapat 1 desa mengalami penurunan dan 143 desa meningkat. Anggaran alokasi dana desa Desa Semoyo di Kecamatan Patuk mengalami penurunan terbesar sebesar Rp. 815.500 dari tahun 2021 sebesar Rp. 555.493.900 dan tahun 2022 sebesar Rp. 554.678.400. Peningkatan anggaran alokasi dana desa terbesar di Desa Semanu Kecamatan Semanu sebesar Rp. 30.805.800 dari tahun 2021 sebesar Rp. 983.968.700 dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.014.774.500. Dan pada periode 2022-2023, terdapat 17 desa mengalami penurunan dan 127 desa meningkat. Anggaran alokasi dana desa Desa Mulo di Kecamatan Wonosari mengalami penurunan terbesar sebesar Rp. 17.532.500 dari tahun 2022 sebesar Rp. 599.805.300 dan tahun 2023 sebesar Rp. 582.272.800. Peningkatan anggaran alokasi dana desa terbesar di Desa

Kampung Kecamatan Ngawen sebesar Rp. 103.939.700 dari tahun 2022 sebesar Rp.827.927.600 dan tahun 2023 sebesar Rp. 931.867.300.

Tabel 4.2
Lima Desa Terbesar dan Terkecil Pertumbuhan IDM dan ADD Tahun 2019-2023

Kecamatan	Desa	2019		2023		Pertumbuhan 2019-2023	
		IDM	ADD (Ribu)	IDM	ADD (Ribu)	IDM	ADD (Ribu)
Wonosari	Wonosari	0,8854	648.668	0,8435	702.307	-0,0419	53.639
Karangmojo	Ngawis	0,7371	654.201	0,7165	840.748	-0,0206	186.546,3
Wonosari	Karangrejek	0,8703	643.118	0,8505	692.662,9	-0,0198	49.544
Panggang	Girimulyo	0,7321	704.536	0,7187	698.585,6	-0,0134	-5.951,3
Panggang	Giriwungu	0,7186	655.167	0,7073	630.069,1	-0,0113	-25.098,5
Ponjong	Genjahan	0,6945	646.953	0,8856	814.939,4	0,1911	167.986,4
Purwosari	Giripurwo	0,6438	800.760	0,8411	794.017,7	0,1973	-6.742,9
Playen	Logandeng	0,7410	692.607	0,9383	787.025	0,1973	94.417,2
Wonosari	Gari	0,6233	661.439	0,8271	755.102,1	0,2038	93.662,3
Karangmojo	Gedangrejo	0,7073	680.835,3	0,9233	842.821,1	0,2160	161.985,8

Berdasarkan data pada tabel 4.2, terlihat bahwa pertumbuhan IDM dari tahun 2019 hingga 2023 tidak selalu sejalan dengan peningkatan alokasi ADD. Walaupun anggaran ADD mengalami peningkatan selama periode tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara kenaikan anggaran ADD dan pertumbuhan IDM. Salah satu faktor utama adalah fleksibilitas dalam penggunaan anggaran ADD yang dikelola langsung oleh pemerintah desa.

Sebagai anggaran yang bersumber dari dana transfer daerah ke desa, ADD memiliki karakteristik pengelolaan yang lebih otonom. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk menentukan prioritas penggunaan ADD sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Fleksibilitas ini memungkinkan desa untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Namun, otonomi ini juga menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Dalam beberapa kasus, penggunaan ADD cenderung lebih berfokus pada kebutuhan jangka pendek atau program-program

yang tidak secara langsung berdampak pada peningkatan indikator IDM, seperti ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

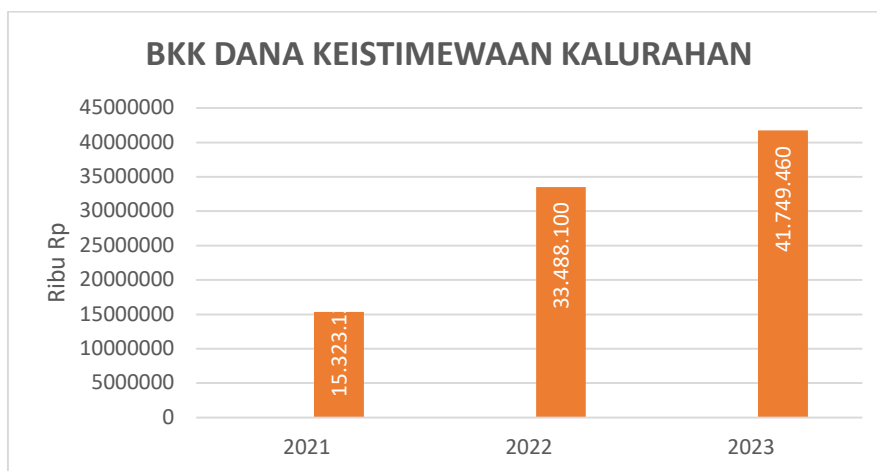
Meskipun demikian, fleksibilitas ADD juga memberikan peluang bagi desa untuk menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kondisi lokal. Desa yang mampu mengelola anggaran secara efektif cenderung memiliki dampak yang lebih besar terhadap peningkatan IDM. Misalnya, ADD dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kapasitas sosial, yang semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan IDM. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang memadai, penggunaan anggaran ADD dapat menjadi kurang optimal dalam mendorong pencapaian indikator IDM.

Dengan demikian, meskipun peningkatan alokasi ADD menjadi modal penting bagi pembangunan desa, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana anggaran tersebut digunakan. Desa yang memiliki tata kelola yang baik dan mampu memanfaatkan ADD sesuai prioritas pembangunan jangka panjang cenderung memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan IDM. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan penggunaan ADD dapat benar-benar mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan IDM. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara peningkatan anggaran ADD dan pertumbuhan IDM, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal.

4.1.4. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (BKK DAIS Kalurahan)

BKK DAIS Kalurahan yang dialokasikan kepada Pemerintah Kalurahan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat diuruskan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. BKK DAIS Kalurahan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam percepatan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat

dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan keberdayaan masyarakat kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan.



Gambar : 4.4

Grafik Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2023

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam alokasi anggaran BKK DAIS Kalurahan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan alokasi anggaran BKK DAIS Kalurahan yang drastis dari tahun 2021 ke 2022, dan kemudian lonjakan yang lebih besar lagi di tahun 2023 yang disalurkan ke tingkat kalurahan. Tren ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Pertumbuhan anggaran yang pesat ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat potensi besar di kalurahan untuk melakukan berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal. Anggaran ini diharapkan dapat mendukung berbagai bidang, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi lokal yang ada di setiap kalurahan.

Besarnya anggaran yang disediakan membuka peluang bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan aksesibilitas yang lebih baik, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan meningkatkan akses terhadap layanan publik. Selain itu, anggaran ini juga berfungsi sebagai modal penting untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, atau program-program peningkatan keterampilan yang dapat membantu masyarakat lebih mandiri dan produktif.

Peningkatan ini juga penting dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selama ini, desa sering kali tertinggal dalam hal pembangunan, sehingga penambahan anggaran yang signifikan ini bisa menjadi langkah maju untuk memperbaiki ketimpangan tersebut. Melalui optimalisasi anggaran BKK DAIS Kalurahan, setiap kalurahan dapat meningkatkan sarana dan prasarana, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah mereka. Hal ini akan membantu mempercepat laju pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan.

Data BKK DAIS Kalurahan Kabupaten Gunungkidul di 144 Desa pada periode tahun 2021-2023 menunjukkan pada tahun 2022 menunjukkan sebanyak 47 desa mengalami penurunan anggaran BKK DAIS Kalurahan dibanding tahun 2021, terbesar di Desa Banyusoco Kecamatan Playen sebesar Rp. 292.790.500 dari tahun 2021 sebesar Rp. 467.790.500 dan tahun 2022 sebesar Rp. 175.000.000. Pada tahun 2022 terdapat 97 desa mengalami peningkatan anggaran BKK DAIS Kalurahan dibandingkan tahun 2021, peningkatan anggaran BKK DAIS Kalurahan terbesar di Desa Putat di Kecamatan Patuk sebesar Rp. 1.908.200.000 dengan anggaran BKK DAIS Kalurahan ditahun 2021 sebesar Rp. 1.075.000.000 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.983.200.000. Dan pada periode 2022-2023, terdapat 49 desa mengalami penurunan, 2 desa tetap, dan 93 desa meningkat. Anggaran BKK DAIS Kalurahan Desa Bejiharjo di Kecamatan Karangmojo mengalami penurunan terbesar sebesar Rp.2.058.200.000 dari tahun 2022 sebesar Rp. 2.983.200.000 dan tahun 2023 sebesar

Rp. 925.000.000. Peningkatan anggaran BKK DAIS Kalurahan terbesar di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari sebesar Rp. 1.634.460.000 dari tahun 2022 sebesar Rp. 563.000.000 dan tahun 2023 sebesar Rp. 2.197.460.000.

Tabel 4.3
Pertumbuhan IDM terhadap Desa yang tidak menerima Anggaran BKK DAIS
Kalurahan

Kecamatan	Desa	Tidak Ada Alokasi DAIS	
		Kenaikan IDM	Tahun
Wonosari	Selang	0	2022
Semin	Pundungsari	0	2022
Semanu	Ngeposari	0	2022
Semin	Karangsari	0,0051	2022
Saptosari	Planjan	0,0076	2022
Gedangsari	Hargomulyo	0,0077	2022
Playen	Getas	0,0146	2023
Patuk	Bunder	0,0222	2022
Semin	Kalitekuk	0,0222	2022
Semin	Kemejing	0,0279	2022
Saptosari	Kepek	0,0299	2022
Ponjong	Sawahan	0,0334	2022
Paliyan	Karangduwet	0,0352	2022
Rongkop	Botodayaan	0,0611	2022

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa meskipun tidak menerima anggaran dari BKK DAIS Kalurahan, sebagian besar Desa tetap mengalami peningkatan dalam IDM. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program-program kegiatan di Desa, yang didanai oleh sumber lain seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, telah dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, penggunaan dana tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa, yang pada akhirnya mendorong peningkatan nilai IDM. Ini menunjukkan bahwa meskipun BKK DAIS Kalurahan tidak tersedia, optimalisasi sumber daya lainnya mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang lebih baik.

Tabel 4.4
Lima Desa Mandiri Terbesar dan Terkecil Pertumbuhan IDM dan BKK DAIS
Kalurahan Tahun 2019-2023

Kecamatan	Desa	2019		2023		Pertumbuhan 2019-2023	
		IDM	DAIS (Ribu)	IDM	DAIS (Ribu)	IDM	DAIS (Ribu)
Wonosari	Karangrejek	0,8671	112.790,5	0,8505	175.000	-0,0166	62.209,5
Wonosari	Selang	0,9321	112.790,5	0,9244	225.000	-0,0077	112.209,5
Wonosari	Gari	0,8310	112.790,5	0,8271	275.000	-0,0039	162.209,5
Wonosari	Wonosari	0,8473	50.000	0,8435	300.000	-0,0038	250.000
Gedangsari	Ngalang	0,8194	50.000	0,8156	2.197.460	-0,0038	2.147.460
Playen	Ngawu	0,7275	75.000	0,8649	25.000	0,1374	-50.000
Girisubo	Pucung	0,7240	50.000	0,8727	325.000	0,1487	275.000
Purwosari	Giripurwo	0,6870	50.000	0,8411	275.000	0,1541	225.000
Ponjong	Genjahan	0,6963	50.000	0,8856	300.000	0,1893	250.000
Karangmojo	Gedangrejo	0,7114	75.000	0,9233	225.000	0,2119	150.000

Berdasarkan Tabel 4.4, terlihat bahwa penggunaan BKK DAIS Kalurahan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pertumbuhan IDM pada desa-desa berstatus mandiri. Hal ini disebabkan oleh program-program BKK DAIS Kalurahan yang kurang relevan atau tidak sepenuhnya selaras dengan indikator-indikator yang memengaruhi pertumbuhan IDM pada desa berstatus mandiri.

Program dan kegiatan yang dibiayai oleh BKK DAIS Kalurahan mencakup berbagai bidang, seperti pembangunan Balai Budaya, pengembangan Demplot Jogja Hijau, Desa Budaya, Desa Mandiri Budaya, Desa Mandiri Pangan, Desa Maritim, Desa Preneur, Desa Prima, Desa Wisata, program Jagawarga Penanganan Covid-19, pembangunan Kawasan Terpadu, Omah Jagawarga, Padat Karya Jogja Istimewa, pemasangan Papan Penanda Keistimewaan, rehabilitasi Balai Padukuhan, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Gaya Yogyakarta, Tata Kelola Pertanahan, serta pelestarian Warisan Budaya Tak Benda.

Namun, meskipun beragam, banyak dari program tersebut lebih berfokus pada penguatan identitas budaya dan sosial ekonomi tertentu daripada secara langsung

meningkatkan dimensi-dimensi utama IDM, seperti infrastruktur dasar, akses ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Akibatnya, kontribusi program BKK DAIS Kalurahan terhadap pertumbuhan IDM, khususnya di desa mandiri, menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh untuk menyelaraskan program BKK DAIS Kalurahan dengan kebutuhan spesifik yang dapat meningkatkan IDM secara lebih signifikan.

4.2. Analisis Data Panel

4.2.1. Estimasi Model Regresi Panel

Dalam mengestimasi model regresi data panel, terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan *Common effect*, pendekatan *Fixed effect* dan *Random effects*.

4.2.1.1. Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.5
Hasil estimasi IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan *Common Effect Model*,
Fixed Effect Model, dan *Random Effect Model*

Variabel Dependen : IDM						
Variabel Independen	<i>Common Effect Model</i>		<i>Fixed Effect Model</i>		<i>Random Effect Model</i>	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
C	0.690166	0.0000	0.525030	0.0000	0.599210	0.0000
DD	0.026072	0.0454	0.065369	0.0000	0.058691	0.0000
ADD	0.062809	0.0086	0.239211	0.0000	0.144880	0.0000
DAIS	0.061597	0.0000	0.033572	0.0000	0.042474	0.0000
R-square	0.135541		0.735970		0.244565	
F-statistic	37.42124		10.93978		77.26624	
Prob (F-statistic)	0.0000		0.0000		0.0000	

Berdasarkan Tabel 4.5, model regresi data panel adalah sebagai berikut:

1. *Common Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Common Effect* sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.690166 + 0,026072_{1it} + 0,062809_{2it} + 0,061597_{3it}$$

Konstanta sebesar 0.690166 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.690166. Koefisien regresi sebesar

0.026072 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.026072. Koefisien regresi sebesar 0.062809 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.062809. Koefisien regresi sebesar 0.061597 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan BKK DAIS Kal maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.061597.

2. *Fixed Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Fixed Effect* adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.525030 + 0.065369_{1it} + 0.239211_{2it} + 0.033572_{3it}$$

Konstanta sebesar 0.525030 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.525030. Koefisien regresi sebesar 0.065369 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.065369. Koefisien regresi sebesar 0.239211 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.239211. Koefisien regresi sebesar 0.033572 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan BKK DAIS Kal maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.033572.

3. *Random Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Random Effect* adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.599210 + 0.058691_{1it} + 0.144880_{2it} + 0.042474_{3it}$$

Konstanta sebesar 0.599210 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.599210. Koefisien regresi sebesar 0.058691 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.058691. Koefisien regresi sebesar 0.144880 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.144880. Koefisien regresi sebesar 0.042474 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan BKK DAIS Kal maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.042474.

4.2.1.2. Regresi Panel IDM, DD, ADD

Tabel 4.6

Hasil estimasi IDM, DD, ADD dengan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*

Variabel Dependen : IDM						
Variabel Independen	<i>Common Effect Model</i>		<i>Fixed Effect Model</i>		<i>Random Effect Model</i>	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
C	0.670580	0.0000	0.487822	0.0000	0.565896	0.0000
DD	0.039656	0.0031	0.076022	0.0000	0.072042	0.0000
ADD	0.081147	0.0010	0.281122	0.0000	0.179275	0.0000
R-square	0.068326		0.723153		0.106895	
F-statistic	26.29127		10.34033		87.89249	
Prob (F-statistic)	0.0000		0.0000		0.0000	

Berdasarkan Tabel 4.6, model regresi data panel adalah sebagai berikut:

1. *Common Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Common Effect* sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.670580 + 0.039656_{1it} + 0.081147_{2it}$$

Konstanta sebesar 0.670580 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.670580. Koefisien regresi sebesar 0.039656 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.039656. Koefisien regresi sebesar 0.081147 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.081147.

2. *Fixed Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Fixed Effect* adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.487822 + 0.076022_{1it} + 0.281122_{2it}$$

Konstanta sebesar 0.487822 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.487822. Koefisien regresi sebesar 0.076022 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.076022. Koefisien regresi sebesar 0.281122 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.281122.

3. *Random Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Random Effect* adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.565896 + 0.072042_{1it} + 0.179275_{2it}$$

Konstanta sebesar 0.565896 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.565896. Koefisien regresi sebesar 0.072042 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.072042. Koefisien regresi sebesar 0.179275 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.179275.

4.2.1.3. Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.7

Hasil estimasi IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*

Variabel Dependen : IDM						
Variabel Independen	<i>Common Effect Model</i>		<i>Fixed Effect Model</i>		<i>Random Effect Model</i>	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
C	0.742579	0.0000	0.541967	0.0000	0.663579	0.0000
DD	0.021983	0.2008	0.069193	0.0000	0.058651	0.0000
ADD	0.044654	0.1647	0.254120	0.0000	0.101760	0.0000
DAIS	0.039648	0.0000	0.022444	0.0000	0.032012	0.0000
R-square	0.114128		0.666088		0.221082	
F-statistic	14.21442		7.661181		31.31608	
Prob (F-statistic)	0.0000		0.0000		0.0000	

Berdasarkan Tabel 4.7, model regresi data panel adalah sebagai berikut:

1. *Common Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Common Effect* sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.742579 + 0.021983_{1it} + 0.044654_{2it} + 0.039648_{3it}$$

Konstanta sebesar 0.742579 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.742579. Koefisien regresi sebesar 0.021983 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan

meningkatkan IDM sebesar 0.021983. Koefisien regresi sebesar 0.044654 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.044654. Koefisien regresi sebesar 0.039648 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan BKK DAIS Kal maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.039648.

2. *Fixed Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Fixed Effect* adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.541967 + 0.069193_{1it} + 0.254120_{2it} + 2.24E - 11_{3it}$$

Konstanta sebesar 0.541967 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.541967. Koefisien regresi sebesar 0.069193 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.069193. Koefisien regresi sebesar 0.254120 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.254120. Koefisien regresi sebesar 0.022444 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan BKK DAIS Kal maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.022444.

3. *Random Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Random Effect* adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.663579 + 0.058651_{1it} + 0.101760_{2it} + 0.032012_{3it}$$

Konstanta sebesar 0.663579 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.663579. Koefisien regresi sebesar 0.058651 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.058651. Koefisien regresi sebesar 0.101760 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.101760. Koefisien regresi sebesar 0.032012 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan BKK DAIS Kal maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.032012.

4.2.1.4. Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.8

Hasil estimasi IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*

Variabel Dependen : IDM						
Variabel Independen	<i>Common Effect Model</i>		<i>Fixed Effect Model</i>		<i>Random Effect Model</i>	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
C	0.649822	0.0000	0.538274	0.0000	0.597950	0.0000
DD	0.044540	0.0033	0.058641	0.0001	0.055599	0.0001
ADD	0.051534	0.0548	0.186691	0.0000	0.107013	0.0008
DAIS	0.092775	0.0000	0.095529	0.0000	0.102193	0.0000
R-square	0.151512		0.645673		0.275333	
F-statistic	22.67797		7.035283		48.25295	
Prob (F-statistic)	0.0000		0.0000		0.0000	

Berdasarkan Tabel 4.8, model regresi data panel adalah sebagai berikut:

1. *Common Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Common Effect* sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.649822 + 0.044540_{1it} + 0.051534_{2it} + 0.092775_{3it}$$

Konstanta sebesar 0.649822 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.649822. Koefisien regresi sebesar 0.044540 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.044540. Koefisien regresi sebesar 0.051534 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.051534. Koefisien regresi sebesar 0.092775 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan BKK DAIS Kal maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.092775.

2. *Fixed Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Fixed Effect* adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.538274 + 0.058641_{1it} + 0.186691_{2it} + 0.095529_{3it}$$

Konstanta sebesar 0.538274 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.538274. Koefisien regresi sebesar 0.058641 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.058641. Koefisien regresi sebesar 0.186691 menyatakan

bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.186691. Koefisien regresi sebesar 0.095529 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan BKK DAIS Kal maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.095529.

3. *Random Effect Model*

Model regresi data panel dengan estimasi *Random Effect* adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = 0.597950 + 0.055599_{1it} + 0.107013_{2it} + 0.102193_{3it}$$

Konstanta sebesar 0.597950 menyatakan bahwa tanpa dipengaruhi oleh DD, ADD dan BKK DAIS Kal maka IDM sebesar 0.597950. Koefisien regresi sebesar 0.055599 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan DD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.055599. Koefisien regresi sebesar 0.107013 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan ADD maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.107013. Koefisien regresi sebesar 0.102193 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan BKK DAIS Kal maka akan meningkatkan IDM sebesar 0.102193.

4.2.2. Teknik Penaksiran Model

Berdasarkan hasil regresi data panel didapatkan tiga model yaitu Model *Common Effect*, Model *Fixed Effect*, dan Model *Random Effect*. Dari hasil uji model tersebut di atas maka dapat dilakukan uji kesesuaian model dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

4.2.2.1. Uji Chow

Pengujian untuk menentukan antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Apabila *probability chi-square* < 0,05 maka yang dipilih adalah model *Fixed Effect*
- b. Apabila *probability chi-square* > 0,05 maka yang dipilih adalah model *Common Effect*

Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan model yang *Common Effect* digunakan, maka perlu melakukan uji Lagrange Multiplier Test (LM-Test) untuk menentukan antara model *Common Effect* dengan model *Random Effect*. Namun apabila dari hasil uji chow menentukan model *Fixed Effect* yang digunakan, maka perlu melakukan uji lanjutan yaitu uji hausman untuk menentukan model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* yang digunakan.

1. Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.9
Hasil Uji Chow Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_EFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.112276	(143,573)	0.0000
Cross-section Chi-square	853.949514	143	0.0000

Hasil pada tabel 4.9 menunjukkan probability dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*.

2. Regresi Panel IDM, DD, ADD

Tabel 4.10
Hasil Uji Chow Regresi Panel IDM, DD, ADD

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_EFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.494296	(143,574)	0.0000
Cross-section Chi-square	873.733137	143	0.0000

Hasil pada tabel 4.10 menunjukkan probability dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*.

3. Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.11

Hasil Uji Chow Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXED_EFFECT

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.637074	(66,265)	0.0000
Cross-section Chi-square	326.857394	66	0.0000

Hasil pada tabel 4.11 menunjukkan probability dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*.

4. Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.12

Hasil Uji Chow Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD,

BKK DAIS Kal

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXED_EFFECT

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.596946	(76,305)	0.0000
Cross-section Chi-square	336.196104	76	0.0000

Hasil pada tabel 4.12 menunjukkan probability dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*.

4.2.2.2. Uji Hausman

Pengujian untuk menentukan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam Uji Hausman dalam penelitian sebagai berikut:

- Apabila *probability chi-square* $< 0,05$ maka yang dipilih adalah model *Fixed Effect*.

b. Apabila *probability chi-square* > 0,05 maka yang dipilih adalah model *Random Effect*

1. Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.13

Hasil Uji Hausman Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANDOM_EFFECT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	35.881007	3	0.0000

Pada hasil tabel 4.13 menunjukkan nilai *probabilty cross-section random* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05, artinya pada hasil uji hausman memilih menggunakan model *Fixed Effect*.

Tabel 4.14

Hasil Model *Fixed Effect* IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal
Dependent Variable: IDM
Method: Panel Least Squares
Date: 12/14/24 Time: 21:07
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 144
Total panel (balanced) observations: 720

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.525030	0.021807	24.07595	0.0000
DD	0.065369	0.011073	5.903677	0.0000
ADD	0.239211	0.033118	7.223075	0.0000
DAIS	0.033572	0.006366	5.274018	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.033325	R-squared	0.735970	
Mean dependent var	0.770432	Adjusted R-squared	0.668695	
S.D. dependent var	0.064901	S.E. of regression	0.037356	
Akaike info criterion	-3.556660	Sum squared resid	0.799619	
Schwarz criterion	-2.621730	Log likelihood	1427.398	
Hannan-Quinn criter.	-3.195726	F-statistic	10.93978	
Durbin-Watson stat	1.502961	Prob(F-statistic)	0.000000	

2. Regresi Panel IDM, DD, ADD

Tabel 4.15
Hasil Uji Hausman Regresi Panel IDM, DD, ADD
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANDOM_EFFECT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	43.125063	2	0.0000

Pada hasil tabel 4.15 menunjukkan nilai *probabilty cross-section random* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05, artinya pada hasil uji hausman memilih menggunakan model *Fixed Effect*.

Tabel 4.16
Hasil Model *Fixed Effect* IDM, DD, ADD
Dependent Variable: IDM
Method: Panel Least Squares
Date: 12/14/24 Time: 21:38
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 144
Total panel (balanced) observations: 720

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.487822	0.021111	23.10748	0.0000
DD	0.076022	0.011138	6.825389	0.0000
ADD	0.281122	0.032892	8.546706	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.034125	R-squared	0.723153	
Mean dependent var	0.770432	Adjusted R-squared	0.653218	
S.D. dependent var	0.064901	S.E. of regression	0.038219	
Akaike info criterion	-3.512036	Sum squared resid	0.838435	
Schwarz criterion	-2.583466	Log likelihood	1410.333	
Hannan-Quinn criter.	-3.153557	F-statistic	10.34033	
Durbin-Watson stat	1.488095	Prob(F-statistic)	0.000000	

3. Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.17

Hasil Uji Hausman Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM_EFFECT

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.062877	3	0.0000

Pada hasil tabel 4.17 menunjukkan nilai *probabilty cross-section random* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05, artinya pada hasil uji hausman memilih menggunakan model *Fixed Effect*.

Tabel 4.18

Hasil Model *Fixed Effect* IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Dependent Variable: IDM

Method: Panel Least Squares

Date: 12/14/24 Time: 22:07

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 67

Total panel (balanced) observations: 335

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.541967	0.033785	16.04187	0.0000
DD	0.069193	0.016006	4.322944	0.0000
ADD	0.254120	0.051431	4.941029	0.0000
DAIS	0.022444	0.007663	2.928829	0.0037

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.036367	R-squared	0.666088
Mean dependent var	0.805305	Adjusted R-squared	0.579144
S.D. dependent var	0.063028	S.E. of regression	0.040889
Akaike info criterion	-3.372422	Sum squared resid	0.443047
Schwarz criterion	-2.575439	Log likelihood	634.8807
Hannan-Quinn criter.	-3.054688	F-statistic	7.661181
Durbin-Watson stat	1.370567	Prob(F-statistic)	0.000000

4. Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.19
Hasil Uji Hausman Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD,
BKK DAIS Kal

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANDOM_EFFECT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.213160	3	0.0016

Pada hasil tabel 4.19 menunjukkan nilai *probabilty cross-section random* sebesar 0,0016 lebih rendah dari 0,05, artinya pada hasil uji hausman memilih menggunakan model *Fixed Effect*.

Tabel 4.20
Hasil Model *Fixed Effect* IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Dependent Variable: IDM
Method: Panel Least Squares
Date: 12/14/24 Time: 21:58
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 77
Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.538274	0.027983	19.23602	0.0000
DD	0.058641	0.015068	3.891795	0.0001
ADD	0.186691	0.042129	4.431427	0.0000
DAIS	0.095529	0.014469	6.602159	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.029409	R-squared	0.645673
Mean dependent var	0.740087	Adjusted R-squared	0.553897
S.D. dependent var	0.049470	S.E. of regression	0.033041
Akaike info criterion	-3.799462	Sum squared resid	0.332978
Schwarz criterion	-2.978008	Log likelihood	811.3964
Hannan-Quinn criter.	-3.473670	F-statistic	7.035283
Durbin-Watson stat	1.787151	Prob(F-statistic)	0.000000

4.3. Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian model dalam penelitian ini meliputi Uji koefisien determinasi (R^2), Uji parsial (uji t), dan Uji Simultan (uji F) sebagai berikut:

4.3.1. Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Rentang nilai R^2 ini adalah nol sampai 1, semakin R^2 mendekati nilai 1 berarti semakin besar variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

a. Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.21
Hasil Uji R^2 Model *Fixed Effect* IDM, DD, ADD, dan BKK DAIS Kal

Root MSE	0.033325	R-squared	0.735970
Mean dependent var	0.770432	Adjusted R-squared	0.668695
S.D. dependent var	0.064901	S.E. of regression	0.037356
Akaike info criterion	-3.556660	Sum squared resid	0.799619
Schwarz criterion	-2.621730	Log likelihood	1427.398
Hannan-Quinn criter.	-3.195726	F-statistic	10.93978
Durbin-Watson stat	1.502961	Prob(F-statistic)	0.000000

Dari table 4.21 dapat dilihat hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* diperoleh R^2 sebesar 0.735970 Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 73,6% sedangkan 26,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

b. Regresi Panel IDM, DD, ADD

Tabel 4.22
Hasil Uji R^2 Model *Fixed Effect* IDM, DD dan ADD

Root MSE	0.034125	R-squared	0.723153
Mean dependent var	0.770432	Adjusted R-squared	0.653218
S.D. dependent var	0.064901	S.E. of regression	0.038219
Akaike info criterion	-3.512036	Sum squared resid	0.838435
Schwarz criterion	-2.583466	Log likelihood	1410.333
Hannan-Quinn criter.	-3.153557	F-statistic	10.34033
Durbin-Watson stat	1.488095	Prob(F-statistic)	0.000000

Dari table 4.22 dapat dilihat hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* diperoleh R^2 sebesar 0.723153 Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 72,3% sedangkan 27,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

c. Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.23
Hasil Uji R^2 Model *Fixed Effect* IDM (Mandiri), DD, ADD, dan BKK DAIS Kal

Root MSE	0.036367	R-squared	0.666088
Mean dependent var	0.805305	Adjusted R-squared	0.579144
S.D. dependent var	0.063028	S.E. of regression	0.040889
Akaike info criterion	-3.372422	Sum squared resid	0.443047
Schwarz criterion	-2.575439	Log likelihood	634.8807
Hannan-Quinn criter.	-3.054688	F-statistic	7.661181
Durbin-Watson stat	1.370567	Prob(F-statistic)	0.000000

Dari table 4.23 dapat dilihat hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* diperoleh R^2 sebesar 0.666088 Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 66,6% sedangkan 33,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

d. Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Tabel 4.24
Hasil Uji R^2 Model *Fixed Effect* IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, dan BKK DAIS Kal

Root MSE	0.029409	R-squared	0.645673
Mean dependent var	0.740087	Adjusted R-squared	0.553897
S.D. dependent var	0.049470	S.E. of regression	0.033041
Akaike info criterion	-3.799462	Sum squared resid	0.332978
Schwarz criterion	-2.978008	Log likelihood	811.3964
Hannan-Quinn criter.	-3.473670	F-statistic	7.035283
Durbin-Watson stat	1.787151	Prob(F-statistic)	0.000000

Dari table 4.24 dapat dilihat hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* diperoleh R^2 sebesar 0.645673 Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 64,6% sedangkan 35,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.2. Uji parsial (uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variable dependen.

a. Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal

Berikut ini adalah tabel uji statistik t pengaruh Dana Desa (X_1), Alokasi Dana Desa (X_2), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X_3) terhadap Indeks Desa Membangun (Y):

Tabel 4.25
Hasil Uji-t Model *Fixed Effect* IDM, DD, ADD, dan BKK DAIS Kal

Variable	t-hitung	t-tabel $\alpha=5\%$
Dana Desa	5.903677	1.65251
Alokasi Dana Desa	7.223075	1.65251
BKK DAIS Kal	5.274018	1.65251

Berdasarkan Tabel 4.25 diketahui t_{hitung} variabel Dana Desa $5.903677 > 1.65251$ t_{tabel} , dengan demikian pengambilan keputusan adalah Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Untuk t_{hitung} variable Alokasi Dana Desa diketahui $7.223075 > 1.65251$ t_{tabel} , dengan demikian pengambilan keputusan adalah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Untuk t_{hitung} variable BKK DAIS Kal diketahui $5.274018 > 1.65251$ t_{tabel} , dengan demikian pengambilan keputusan adalah BKK DAIS Kal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

b. Regresi Panel IDM, DD, ADD

Berikut ini adalah tabel uji statistik t pengaruh Dana Desa (X_1), dan Alokasi Dana Desa (X_2) terhadap Indeks Desa Membangun (Y):

Tabel 4.26
Hasil Uji-t Model *Fixed Effect* IDM, DD, ADD

Variable	t-hitung	t-tabel $\alpha=5\%$
Dana Desa	6.825389	1.65251
Alokasi Dana Desa	8.546706	1.65251

Berdasarkan Tabel 4.26. diketahui t_{hitung} variabel Dana Desa $6.825389 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Untuk t_{hitung} variable Alokasi Dana Desa diketahui $8.546706 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

c. Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Berikut ini adalah tabel uji statistik t pengaruh Dana Desa (X_1), Alokasi Dana Desa (X_2), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X_3) terhadap Indeks Desa Membangun (Y):

Tabel 4.27
Hasil Uji-t Model *Fixed Effect* IDM (Mandiri), DD, ADD, dan BKK DAIS Kal

Variable	t-hitung	t-tabel $\alpha=5\%$
Dana Desa	4.322944	1.65251
Alokasi Dana Desa	4.941029	1.65251
BKK DAIS Kal	2.928829	1.65251

Berdasarkan Tabel 4.27. diketahui t_{hitung} variabel Dana Desa $4.322944 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Untuk t_{hitung} variable Alokasi Dana Desa diketahui $4.941029 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Untuk t_{hitung} variable BKK DAIS Kal diketahui $2.928829 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah BKK DAIS Kal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

d. Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Berikut ini adalah tabel uji statistik t pengaruh Dana Desa (X_1), Alokasi Dana Desa (X_2), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X_3) terhadap Indeks Desa Membangun (Y):

Tabel 4.28
Hasil Uji-t Model *Fixed Effect* IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, dan
BKK DAIS Kal

Variable	t-hitung	t-tabel $\alpha=5\%$
Dana Desa	3.891795	1.65251
Alokasi Dana Desa	4.431427	1.65251
BKK DAIS Kal	6.602159	1.65251

Berdasarkan Tabel 4.28. diketahui t_{hitung} variabel Dana Desa $3.891795 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Untuk t_{hitung} variable Alokasi Dana Desa diketahui $4.431427 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Untuk t_{hitung} variable BKK DAIS Kal diketahui $6.602159 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah BKK DAIS Kal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

4.3.3. Uji Simultan (uji F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas *p-value*. Apabila probabilitas *p-value* $< \alpha$ (0.05) maka H_0 ditolak artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila probabilitas *p-value* $> \alpha$ (0.05) maka H_0 diterima artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta \geq 0.05$, artinya variable Dana Desa (X_1), Alokasi Dana Desa (X_2), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X_3) tidak terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (Y).

2. $H_1 : \beta \leq 0.05$, artinya variable Dana Desa (X_1), Alokasi Dana Desa (X_2), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X_3) terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (Y).

- a. Regresi Panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal

Hasil Uji F ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.29
Hasil Uji-f Model *Fixed Effect* IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal

Root MSE	0.033325	R-squared	0.735970
Mean dependent var	0.770432	Adjusted R-squared	0.668695
S.D. dependent var	0.064901	S.E. of regression	0.037356
Akaike info criterion	-3.556660	Sum squared resid	0.799619
Schwarz criterion	-2.621730	Log likelihood	1427.398
Hannan-Quinn criter.	-3.195726	F-statistic	10.93978
Durbin-Watson stat	1.502961	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji F tingkat Prob (*F-Statistic*) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa (X_1), Alokasi Dana Desa (X_2), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X_3) terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (Y).

- b. Regresi Panel IDM, DD, ADD

Hasil Uji F ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.30
Hasil Uji-f Model *Fixed Effect* IDM, DD, ADD

Root MSE	0.034125	R-squared	0.723153
Mean dependent var	0.770432	Adjusted R-squared	0.653218
S.D. dependent var	0.064901	S.E. of regression	0.038219
Akaike info criterion	-3.512036	Sum squared resid	0.838435
Schwarz criterion	-2.583466	Log likelihood	1410.333
Hannan-Quinn criter.	-3.153557	F-statistic	10.34033
Durbin-Watson stat	1.488095	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji F tingkat Prob (*F-Statistic*) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel Dana Desa (X_1) dan Alokasi Dana Desa (X_2) terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (Y).

c. Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Hasil Uji F ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.31
Hasil Uji-f Model *Fixed Effect* IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Root MSE	0.036367	R-squared	0.666088
Mean dependent var	0.805305	Adjusted R-squared	0.579144
S.D. dependent var	0.063028	S.E. of regression	0.040889
Akaike info criterion	-3.372422	Sum squared resid	0.443047
Schwarz criterion	-2.575439	Log likelihood	634.8807
Hannan-Quinn criter.	-3.054688	F-statistic	7.661181
Durbin-Watson stat	1.370567	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji F tingkat Prob (*F-Statistic*) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa (X_1), Alokasi Dana Desa (X_2), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X_3) terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (Y).

d. Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Hasil Uji F ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.32
Hasil Uji-f Model *Fixed Effect* IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Root MSE	0.029409	R-squared	0.645673
Mean dependent var	0.740087	Adjusted R-squared	0.553897
S.D. dependent var	0.049470	S.E. of regression	0.033041
Akaike info criterion	-3.799462	Sum squared resid	0.332978
Schwarz criterion	-2.978008	Log likelihood	811.3964
Hannan-Quinn criter.	-3.473670	F-statistic	7.035283
Durbin-Watson stat	1.787151	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji F tingkat Prob (*F-Statistic*) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa (X_1), Alokasi Dana Desa (X_2), Bantuan Keuangan Khusus

Dana Keistimewaan Kalurahan (X_3) terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (Y).

4.4. Pembahasan

4.4.1. Dana Desa (X_1)

Pengaruh Anggaran Dana Desa terhadap Besar Indeks Desa Membangun

Berdasarkan hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa regresi panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal menunjukkan bahwa dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel Dana Desa $5.903677 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar Dana Desa akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,065369. Hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa Regresi Panel IDM, DD, ADD output dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel Dana Desa $6.825389 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar Dana Desa akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,076022. Hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa Regresi Panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal, output dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel Dana Desa $4.322944 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar, Dana Desa akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,069193. Dan hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa Regresi Panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal output dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel Dana Desa $3.891795 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian

pengambilan keputusan adalah Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar Dana Desa akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,058641.

Dari hasil 4 (empat) regresi panel diketahui bahwa model regresi data panel dengan pengaruh tertinggi dari variabel Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun adalah regresi panel IDM, DD, ADD yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,076022. Koefisien ini mencerminkan bahwa regresi tersebut menunjukkan dampak terbesar dari Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun. Dengan demikian, model ini dapat dianggap paling efektif untuk menjelaskan hubungan positif antara Dana Desa dengan peningkatan Indeks Desa Membangun, dibandingkan dengan model lainnya yang memasukkan variabel tambahan seperti BKK DAIS Kal atau status IDM tertentu (Mandiri, Berkembang, dan Maju).

4.4.2. Alokasi Dana Desa (X2)

Pengaruh Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Besar Indeks Desa Membangun

Berdasarkan hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa regresi panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel Alokasi Dana Desa $7.223075 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar Alokasi Dana Desa akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,239211. Hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa regresi panel IDM, DD, ADD dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel Alokasi Dana Desa $8.546706 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar Alokasi Dana Desa akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,281122. Hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa regresi panel IDM status Mandiri, DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel Alokasi Dana Desa $4.941029 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar Alokasi Dana Desa akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,254120. Dan hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa regresi panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel Alokasi Dana Desa $4.431427 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar Alokasi Dana Desa akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,186691.

Dari hasil 4 (empat) regresi panel diketahui bahwa model regresi data panel dengan pengaruh tertinggi dari variabel Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun adalah regresi panel IDM, DD, ADD yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,281122. Koefisien ini mencerminkan bahwa regresi tersebut menunjukkan dampak terbesar dari Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun. Dengan demikian, model ini dapat dianggap paling efektif untuk menjelaskan hubungan positif antara Alokasi Dana Desa dengan peningkatan Indeks Desa Membangun, dibandingkan dengan model lainnya yang memasukkan variabel tambahan seperti BKK DAIS Kal atau status IDM tertentu (Mandiri, Berkembang, dan Maju).

4.4.3. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X3)

Pengaruh Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan terhadap Besar Indeks Desa Membangun.

Berdasarkan hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa regresi panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel BKK DAIS Kal $5.274018 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah BKK DAIS Kal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar BKK DAIS Kal akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,033572. Hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa regresi panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel BKK DAIS Kal $2.928829 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah BKK DAIS Kal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar BKK DAIS Kal akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,022444. Dan hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa regresi panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal dengan Model *Fixed Effect* pada lampiran diketahui t_{hitung} variabel BKK DAIS Kal $6.602159 > 1.65251 t_{tabel}$, dengan demikian pengambilan keputusan adalah BKK DAIS Kal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambah Rp. 1 milyar BKK DAIS Kal akan berpengaruh terhadap besaran Indeks Desa Membangun sebesar 0,095529.

Dari hasil regresi data panel yang tersebut, model regresi data panel yang menghasilkan pengaruh tertinggi dari variabel BKK DAIS Kal terhadap Indeks Desa Membangun adalah model IDM (Berkembang dan Maju), DD,

ADD, BKK DAIS Kal dengan Model Fixed Effect. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,095529. Model regresi data panel ini menunjukkan bahwa alokasi dana BKK DAIS Kal memberikan dampak tertinggi terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun untuk desa yang berstatus Berkembang dan Maju. Dengan demikian, model ini dapat dianggap yang paling efektif dalam menjelaskan hubungan positif dan signifikan antara BKK DAIS Kal dan Indeks Desa Membangun, terutama untuk desa dalam kategori Berkembang dan Maju.

4.4.4. Pengaruh Dana Desa (X1), Alokasi Dana Desa (X2), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X3) terhadap Indeks Desa Membangun (Y)

Tabel 4.33
Hasil Model *Fixed Effect* seluruh model uji regresi

Variabel	IDM, DD, ADD, DAIS		IDM, DD, ADD		IDM(Mandiri), DD, ADD, DAIS		IDM (Berkembang, Maju), DD, ADD, DAIS	
	Koef.	Prob.	Koef.	Prob.	Koef.	Prob.	Koef.	Prob.
C	0.525030	0.0000	0.487822	0.0000	0.541967	0.0000	0.538274	0.0000
DD	0.065369	0.0000	0.076022	0.0000	0.069193	0.0000	0.058641	0.0001
ADD	0.239211	0.0000	0.281122	0.0000	0.254120	0.0000	0.186691	0.0000
DAIS	0.033572	0.0000			0.022444	0.0000	0.095529	0.0000
R-square	0.735970		0.723153		0.666088		0.645673	
F-statistic	10.93978		10.34033		7.661181		7.035283	
Prob (F-stat.)	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* regresi panel IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal diperoleh R^2 sebesar 0,735970. Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 73,6% sedangkan 26,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dan berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa tingkat Prob (*F-Statistic*) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa (X_1), Alokasi Dana Desa (X_2), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan

(X₃) terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (Y). Hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* regresi panel IDM, DD, ADD diperoleh R² sebesar 0.723153. Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 72,3% sedangkan 27,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dan berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa tingkat Prob (F-Statistic) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H₀ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa (X₁), Alokasi Dana Desa (X₂) terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (Y). Hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* regresi panel IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal diperoleh R² sebesar 0.666088. Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 66,6% sedangkan 33,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dan berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa tingkat Prob (F-Statistic) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H₀ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa (X₁), Alokasi Dana Desa (X₂), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X₃) terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (Y). Hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* regresi panel IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal diperoleh R² sebesar 0.645673. Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 64,6% sedangkan 35,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dan berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa tingkat Prob (F-Statistic) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H₀ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa (X₁), Alokasi Dana Desa (X₂), Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan (X₃) terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (Y).

Dari tabel 4.33 menunjukkan bahwa ADD lebih efektif dibandingkan dengan DD dan DAIS di seluruh uji, ini menunjukkan bahwa penggunaan ADD

dalam pembangunan desa lebih tepat dibandingkan DD dan DAIS. Hal ini disebabkan ADD dikelola langsung oleh pemerintah desa yang lebih fleksibel dalam penggunaan anggaran dan memiliki karakteristik pengelolaan yang otonom. ADD memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan desa dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis kebutuhan lokal. ADD diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pengembangan usaha mikro, serta dukungan kegiatan sosial yang bertujuan menciptakan kemandirian jangka panjang. Dengan pengelolaan yang fleksibel, ADD disalurkan langsung ke desa dan dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan prioritas yang ditentukan dalam musyawarah desa (Musdes), sehingga penggunaannya lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak. Sebagian anggaran juga dialokasikan untuk memperkuat pemerintahan desa, termasuk operasional, pengelolaan administrasi, dan pembinaan perangkat desa, yang berkontribusi pada efisiensi pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, ADD mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur sederhana, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial, yang menciptakan sinergi antar program untuk meningkatkan IDM. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, ADD memastikan penggunaan dana lebih tepat sasaran dan meningkatkan rasa memiliki. Dibandingkan dengan DD yang lebih terfokus pada infrastruktur besar dengan pendekatan top-down, dan DAIS, yang cakupannya terbatas pada infrastruktur sosial, ADD lebih efektif karena mengintegrasikan fleksibilitas, pemberdayaan, dan keterlibatan komunitas untuk mewujudkan pembangunan desa yang holistik.

Dari tabel 4.33 menunjukkan bahwa BKK DAIS Kalurahan lebih efektif untuk desa dengan status berkembang dan maju dibandingkan desa dengan status mandiri karena sifat dan tujuan penggunaannya yang lebih relevan dengan kebutuhan desa pada tahap pertumbuhan. Fokus utama BKK DAIS Kalurahan adalah pada penguatan infrastruktur sosial, seperti Balai Budaya, Demplot Jogja Hijau, Desa Budaya, Desa Mandiri Budaya, Desa Mandiri

Pangan, Desa Maritim, Desa Preneur, Desa Prima, Desa Wisata, Jagawarga Penanganan Covid, Kawasan Terpadu, Omah Jagawarga, Padat Karya Jogja Istimewa, Papan Penanda Keistimewaan, Rehab Balai Padukuhan, RTLH Gaya Yogyakarta, Tata Kelola Pertanahan, Warisan Budaya Tak Benda, yang sangat dibutuhkan oleh desa berkembang dan maju untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Desa berkembang biasanya sudah memiliki infrastruktur dasar, tetapi masih memerlukan fasilitas tambahan untuk mendukung layanan publik yang lebih baik. Begitu pula, desa maju membutuhkan infrastruktur sosial yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan mendukung kegiatan produktif masyarakat, misalnya ruang pelatihan keterampilan atau pusat kebudayaan. Sementara itu, desa mandiri cenderung sudah memiliki infrastruktur sosial yang memadai, sehingga kebutuhan mereka lebih terfokus pada pengembangan ekonomi skala besar dan inovasi teknologi, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan BKK DAIS Kalurahan. Selain itu, BKK DAIS Kalurahan memberikan efek multiplier yang signifikan bagi desa berkembang dan maju, karena pembangunan infrastruktur sosial pada tahap ini dapat mendorong percepatan transisi desa berkembang menjadi desa maju dan desa maju menuju mandiri. Misalnya, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, sementara pembangunan ruang publik memperkuat interaksi sosial dan mendorong kegiatan ekonomi lokal. Penyerapan dana BKK DAIS Kalurahan juga lebih optimal pada desa berkembang dan maju karena tingkat kemampuan administratif dan manajerial desa pada tahap ini sudah cukup baik. Sebaliknya, pada desa mandiri, pengaruh BKK DAIS Kalurahan cenderung kurang signifikan karena kebutuhan mereka sudah lebih kompleks, seperti mengintegrasikan teknologi atau mengembangkan akses pasar global. Dengan demikian, alokasi BKK DAIS Kalurahan lebih sesuai untuk memenuhi tantangan dan kebutuhan desa berkembang dan maju yang masih berada dalam proses penguatan layanan dasar dan infrastruktur sosial.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian penelitian Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul menggunakan model *Fixed Effect* pada pengujian variabel:
 - a. Indeks Desa Membangun, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan diperoleh R^2 sebesar 0.735970 Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 73,6% sedangkan 26,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
 - b. Indeks Desa Membangun, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa diperoleh R^2 sebesar 0.723153 Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 72,3% sedangkan 27,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
 - c. Indeks Desa Membangun (status Mandiri), Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan diperoleh R^2 sebesar 0.666088 Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 66,6% sedangkan 33,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
 - d. Indeks Desa Membangun (status Berkembang dan Maju), Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan diperoleh R^2 sebesar 0.645673 Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan dependen sebesar 64,6% sedangkan 35,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.
3. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan terdapat pengaruh secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun.
4. Alokasi Dana Desa lebih berpengaruh terhadap peningkatan IDM dibandingkan Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan di empat (4) model regresi. Alokasi Dana Desa yang lebih fleksibel dalam penggunaan anggaran dan memiliki karakteristik pengelolaan yang lebih otonom yang dikelola langsung oleh pemerintah desa sehingga desa dapat menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa.
5. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan lebih berpengaruh terhadap peningkatan IDM pada desa berstatus berkembang dan maju dibandingkan mandiri. Penggunaan BKK DAIS Kalurahan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pertumbuhan IDM pada desa-desa berstatus mandiri, karena banyak programnya, seperti pembangunan Balai Budaya, Desa Wisata, dan Desa Mandiri Budaya, lebih berfokus pada penguatan identitas budaya dan sosial ekonomi tertentu. Akibatnya, kontribusi terhadap pertumbuhan IDM menjadi kurang optimal. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menyelaraskan program-program ini dengan kebutuhan spesifik yang dapat lebih signifikan meningkatkan IDM.

5.2. IMPLIKASI

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini mengenai Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan mempunyai pengaruh yang signifikan dan simultan terhadap Indeks Desa Membangun. Sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan. Kebijakan yang berbasis pada data dan analisis yang mendalam dapat meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan.
2. Peningkatan dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan, termasuk pelatihan bagi aparat desa dan masyarakat untuk memahami cara yang tepat dalam menggunakan dana tersebut. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
3. Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan. Keterlibatan ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program yang dijalankan, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
4. Pentingnya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan. Dengan adanya sistem evaluasi yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan.
5. Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik dari

segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Ini berarti bahwa program yang dijalankan harus tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan dengan melihat aspek dimensi pada IDM.

6. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan. Kerjasama yang baik dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dalam mencapai tujuan bersama.

5.3. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi perangkat desa serta masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan. Upaya peningkatan kapasitas ini bertujuan agar semua pihak dapat merencanakan, memanfaatkan, dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut secara efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat mendukung peningkatan Indeks Desa Membangun secara optimal.
2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan. Sistem ini harus mampu memberikan umpan balik yang cepat dan akurat mengenai penggunaan dana, sehingga dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan.
3. Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan

akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal.

4. Program yang didanai oleh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan sebaiknya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, disarankan untuk merancang program yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
5. Pemerintah desa menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat memperkuat program pembangunan dan memberikan akses kepada sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas.
6. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan strategi yang ada, serta untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
7. Pemerintah meningkatkan akses informasi mengenai penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2012). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Tirta, S. T. (2013). *Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3. Sekretariat Daerah. DIY.
- Wahyuni, D. (2015). *Analisis Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto Antar Kota Bandar Lampung Dan Kota Metro*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Utari, T. S. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimumn Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Pada Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1. Sekretariat Daerah. DIY.

- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5. Sekretariat Daerah. DIY.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12. Sekretariat Daerah. DIY.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). Peraturan Daerah Istimewa Nomor Perda No.1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7. Sekretariat Daerah. DIY.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131. Sekretariat Daerah. DIY.
- Arina, A. I., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.22 No.3, 22-41.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13. Sekretariat Daerah. DIY.
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 48, No. 1, Juni 2022, 17-36.

- Kementrian Keuangan. (2023). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 163 tahun 2023 tentang Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108. Biro Umum. Jakarta.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52. Sekretariat Daerah. DIY.
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Volume 4, Nomor 1, 51-71.
- Hariwibowo, I. N., & Wardhana, D. Y. (2023). Peran Dana Desa Dalam Peningkatan Ketahanan Lingkungan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosiding SENAPAS, Vol. 1, No. 1, Juni 2023, 140-146.
- Rangkuti, S. F., Sukardi, & M. Syafii. (2024). Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Konsep Blue Economy Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Sumatera Utara. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 8 Nomor 1, Januari 2024, 983-995.

LAMPIRAN

1. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Gedangsari	Hargomulyo	0,8230	0,8246	0,8352	0,8429	0,8486
2	Gedangsari	Mertelu	0,7870	0,7911	0,7911	0,8078	0,7944
3	Gedangsari	Ngalang	0,8062	0,8062	0,8194	0,8194	0,8156
4	Gedangsari	Sampang	0,6843	0,6887	0,7206	0,7429	0,8059
5	Gedangsari	Serut	0,7778	0,7781	0,7781	0,7948	0,7910
6	Gedangsari	Tegalrejo	0,7405	0,7500	0,7500	0,7646	0,8522
7	Gedangsari	Watugajah	0,7188	0,7206	0,7689	0,7746	0,7594
8	Girisubo	Balong	0,7146	0,7148	0,7148	0,7803	0,7708
9	Girisubo	Jepitu	0,7094	0,7113	0,7113	0,7281	0,7967
10	Girisubo	Jerukwudel	0,7501	0,8873	0,8873	0,8949	0,8873
11	Girisubo	Karangawen	0,7184	0,7254	0,7292	0,7292	0,7849
12	Girisubo	Nglindur	0,7611	0,7148	0,7890	0,8341	0,8341
13	Girisubo	Pucung	0,7202	0,7240	0,7240	0,8784	0,8727
14	Girisubo	Songbanyu	0,7052	0,7478	0,7478	0,8313	0,8256
15	Girisubo	Tileng	0,6837	0,7681	0,8298	0,8432	0,8394
16	Karangmojo	Bejiharjo	0,8435	0,8617	0,8840	0,8971	0,8914
17	Karangmojo	Bendungan	0,7030	0,6560	0,6998	0,7110	0,7205
18	Karangmojo	Gedangrejo	0,7073	0,7114	0,7114	0,7322	0,9233
19	Karangmojo	Jatiayu	0,6929	0,6986	0,6986	0,7987	0,7949
20	Karangmojo	Karangmojo	0,7594	0,7702	0,7702	0,7924	0,8000
21	Karangmojo	Kelor	0,7241	0,7035	0,6997	0,7940	0,7883
22	Karangmojo	Ngawis	0,7371	0,7533	0,7533	0,7610	0,7165
23	Karangmojo	Ngipak	0,6735	0,6773	0,7063	0,7402	0,7363
24	Karangmojo	Wiladeg	0,7133	0,7286	0,7397	0,8756	0,8717
25	Ngawen	Beji	0,6257	0,6035	0,6035	0,8022	0,7984
26	Ngawen	Jurangjero	0,6794	0,7422	0,7632	0,8041	0,8025
27	Ngawen	Kampung	0,7500	0,7687	0,7706	0,7819	0,7781
28	Ngawen	Sambirejo	0,7606	0,7759	0,7759	0,7949	0,8000
29	Ngawen	Tancep	0,7501	0,7946	0,8022	0,8137	0,7933
30	Ngawen	Watusigar	0,7140	0,7216	0,7448	0,7746	0,7708
31	Nglipar	Katongan	0,7122	0,7256	0,7256	0,7443	0,8433

No	Kecamatan	Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)				
			2019	2020	2021	2022	2023
32	Nglipar	Kedungkeris	0,6613	0,6892	0,6892	0,7971	0,8216
33	Nglipar	Kedungpoh	0,6852	0,7129	0,7129	0,8190	0,8375
34	Nglipar	Natah	0,6573	0,6363	0,6417	0,7097	0,7356
35	Nglipar	Nglipar	0,7889	0,7743	0,7854	0,8673	0,8784
36	Nglipar	Pengkol	0,6516	0,6583	0,6583	0,7363	0,7548
37	Nglipar	Pilangrejo	0,6846	0,6973	0,6973	0,7202	0,7125
38	Paliyan	Giring	0,6479	0,7057	0,6854	0,7375	0,7968
39	Paliyan	Grogol	0,7519	0,7921	0,7921	0,8124	0,8143
40	Paliyan	Karangasem	0,6294	0,6605	0,6681	0,7125	0,7735
41	Paliyan	Karangduwet	0,7930	0,7340	0,7656	0,8008	0,8173
42	Paliyan	Mulusan	0,7071	0,7294	0,7294	0,7516	0,7649
43	Paliyan	Pampang	0,6746	0,6971	0,6971	0,7097	0,7281
44	Paliyan	Sodo	0,6537	0,6965	0,6965	0,7948	0,8114
45	Panggang	Giriharjo	0,8148	0,7979	0,7979	0,8056	0,8330
46	Panggang	Girikarto	0,7597	0,7927	0,7965	0,8076	0,7871
47	Panggang	Girimulyo	0,7321	0,7406	0,7613	0,8135	0,7187
48	Panggang	Girisekar	0,7611	0,7111	0,7073	0,7562	0,7581
49	Panggang	Girisuko	0,7210	0,7432	0,7432	0,7654	0,7559
50	Panggang	Giriwungu	0,7186	0,7167	0,7075	0,7132	0,7073
51	Patuk	Beji	0,7110	0,7724	0,7724	0,8151	0,8227
52	Patuk	Bunder	0,8056	0,8076	0,8111	0,8333	0,8352
53	Patuk	Nglanggeran	0,7819	0,7756	0,7756	0,8375	0,8376
54	Patuk	Nglegi	0,7465	0,8116	0,8116	0,8119	0,8157
55	Patuk	Ngoro-oro	0,8412	0,8378	0,8378	0,8397	0,8435
56	Patuk	Patuk	0,8224	0,8670	0,8670	0,8765	0,8854
57	Patuk	Pengkok	0,6195	0,8054	0,8054	0,7943	0,7967
58	Patuk	Putat	0,7948	0,8060	0,8041	0,8229	0,8394
59	Patuk	Salam	0,6448	0,6952	0,6952	0,8041	0,8156
60	Patuk	Semoyo	0,7137	0,7308	0,7308	0,7625	0,7740
61	Patuk	Terbah	0,7201	0,8144	0,8144	0,8163	0,8184
62	Playen	Banaran	0,6995	0,7010	0,7232	0,7792	0,8210
63	Playen	Bandung	0,7514	0,7629	0,7629	0,8059	0,8867
64	Playen	Banyusoco	0,7814	0,8076	0,8076	0,8114	0,8114
65	Playen	Bleberan	0,7313	0,7314	0,7543	0,7562	0,7581
66	Playen	Dengok	0,6967	0,7079	0,7079	0,7937	0,8086

No	Kecamatan	Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)				
			2019	2020	2021	2022	2023
67	Playen	Gading	0,8671	0,8935	0,8935	0,9157	0,9422
68	Playen	Getas	0,7222	0,7368	0,7349	0,7368	0,7514
69	Playen	Logandeng	0,7410	0,8635	0,8635	0,8857	0,9383
70	Playen	Ngawu	0,7127	0,7163	0,7275	0,7484	0,8649
71	Playen	Ngleri	0,7059	0,7071	0,7071	0,7110	0,7941
72	Playen	Ngunut	0,6875	0,6925	0,7414	0,8081	0,8376
73	Playen	Playen	0,8024	0,8043	0,8098	0,8137	0,9248
74	Playen	Plembutan	0,6981	0,7038	0,7335	0,7873	0,7911
75	Ponjong	Bedoyo	0,7583	0,7508	0,7508	0,7622	0,7846
76	Ponjong	Genjahan	0,6945	0,6963	0,6963	0,8970	0,8856
77	Ponjong	Gombang	0,6707	0,6525	0,6525	0,7713	0,7973
78	Ponjong	Karangasem	0,6402	0,6268	0,6268	0,7702	0,7948
79	Ponjong	Kenteng	0,6327	0,6549	0,6549	0,7792	0,7960
80	Ponjong	Ponjong	0,6537	0,6948	0,6897	0,7327	0,8198
81	Ponjong	Sawahan	0,6881	0,6976	0,6976	0,7310	0,7478
82	Ponjong	Sidorejo	0,6725	0,6592	0,6833	0,7690	0,7454
83	Ponjong	Sumbergiri	0,7208	0,7005	0,7005	0,8116	0,8078
84	Ponjong	Tambakromo	0,6833	0,6922	0,6922	0,7443	0,7794
85	Ponjong	Umbulrejo	0,7446	0,7390	0,7522	0,8465	0,8465
86	Purwosari	Giriasih	0,7421	0,7570	0,7570	0,7570	0,7608
87	Purwosari	Giricahyo	0,6549	0,6844	0,6844	0,7310	0,7271
88	Purwosari	Girijati	0,6865	0,6662	0,6662	0,7867	0,7997
89	Purwosari	Giripurwo	0,6438	0,6870	0,6870	0,8487	0,8411
90	Purwosari	Giritirto	0,7289	0,6671	0,6995	0,7256	0,7275
91	Rongkop	Bohol	0,7040	0,7097	0,7097	0,7097	0,7887
92	Rongkop	Botodayaan	0,6892	0,6968	0,6968	0,7579	0,7560
93	Rongkop	Karangwuni	0,7057	0,7076	0,7076	0,7076	0,7324
94	Rongkop	Melikan	0,6797	0,6911	0,7006	0,7895	0,7895
95	Rongkop	Petir	0,7021	0,7040	0,7021	0,7592	0,7370
96	Rongkop	Pringombo	0,6779	0,6798	0,6798	0,7910	0,8132
97	Rongkop	Pucanganom	0,7071	0,7071	0,7052	0,7073	0,7111
98	Rongkop	Semugih	0,7721	0,7741	0,7741	0,7856	0,8433
99	Saptosari	Jetis	0,7206	0,7200	0,7200	0,7562	0,7600
100	Saptosari	Kanigoro	0,7540	0,7797	0,7797	0,7873	0,7981
101	Saptosari	Kepek	0,7835	0,7968	0,7968	0,8267	0,8432

No	Kecamatan	Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)				
			2019	2020	2021	2022	2023
102	Saptosari	Krambilsawit	0,6686	0,6813	0,6813	0,7927	0,7944
103	Saptosari	Monggol	0,6574	0,6721	0,6721	0,7241	0,7406
104	Saptosari	Ngloro	0,6608	0,6994	0,6994	0,7384	0,7402
105	Saptosari	Planjan	0,7778	0,8035	0,8035	0,8111	0,8149
106	Semanu	Candirejo	0,7725	0,7987	0,8154	0,8178	0,8210
107	Semanu	Dadapayu	0,7086	0,7970	0,8037	0,8246	0,8284
108	Semanu	Ngeposari	0,7554	0,7916	0,8003	0,8003	0,8213
109	Semanu	Pacarejo	0,7094	0,7919	0,8030	0,8310	0,8290
110	Semanu	Semanu	0,7463	0,7989	0,8154	0,8487	0,8671
111	Semin	Bendung	0,7022	0,7821	0,7821	0,8302	0,8319
112	Semin	Bulurejo	0,7018	0,7703	0,7703	0,8097	0,8281
113	Semin	Candirejo	0,7652	0,7743	0,7743	0,7854	0,7889
114	Semin	Kalitekuk	0,7057	0,7856	0,7856	0,8078	0,8151
115	Semin	Karangsari	0,8062	0,8081	0,8081	0,8132	0,8132
116	Semin	Kemejing	0,6970	0,7748	0,7748	0,8027	0,8043
117	Semin	Pundungsari	0,7879	0,8137	0,8137	0,8137	0,8244
118	Semin	Rejosari	0,7835	0,7944	0,7963	0,8075	0,8148
119	Semin	Semin	0,8337	0,9230	0,9230	0,9265	0,9379
120	Semin	Sumberejo	0,7040	0,7800	0,7800	0,8300	0,8389
121	Tanjungsari	Banjarejo	0,7464	0,8037	0,8148	0,8148	0,8110
122	Tanjungsari	Hargosari	0,7292	0,7892	0,8003	0,8041	0,7854
123	Tanjungsari	Kemadang	0,8752	0,9065	0,9065	0,9065	0,9046
124	Tanjungsari	Kemiri	0,8040	0,8038	0,8038	0,8578	0,8597
125	Tanjungsari	Ngestirejo	0,8003	0,8076	0,8076	0,8132	0,8297
126	Tepus	Giripanggung	0,6926	0,7646	0,7684	0,7779	0,7800
127	Tepus	Purwodadi	0,8021	0,8081	0,8192	0,8248	0,8248
128	Tepus	Sidoharjo	0,8125	0,8795	0,8852	0,8929	0,9043
129	Tepus	Sumberwungu	0,6263	0,6837	0,6875	0,7763	0,7763
130	Tepus	Tepus	0,8111	0,8114	0,8152	0,8152	0,8210
131	Wonosari	Baleharjo	0,8352	0,8479	0,8479	0,8479	0,8644
132	Wonosari	Duwet	0,7944	0,7948	0,7614	0,7519	0,8281
133	Wonosari	Gari	0,6233	0,7319	0,8310	0,8310	0,8271
134	Wonosari	Karangrejek	0,8703	0,8652	0,8671	0,8543	0,8505
135	Wonosari	Karangtengah	0,6976	0,6830	0,6830	0,7667	0,7743
136	Wonosari	Kepek	0,8878	0,9233	0,9233	0,9233	0,9195

No	Kecamatan	Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)				
			2019	2020	2021	2022	2023
137	Wonosari	Mulo	0,7857	0,8117	0,8156	0,8359	0,8356
138	Wonosari	Piyaman	0,7333	0,7108	0,7275	0,7386	0,8237
139	Wonosari	Pulutan	0,7676	0,7989	0,7989	0,7989	0,8265
140	Wonosari	Selang	0,7908	0,8098	0,9321	0,9321	0,9244
141	Wonosari	Siraman	0,7427	0,8068	0,8068	0,7876	0,7857
142	Wonosari	Wareng	0,7932	0,7989	0,8027	0,8252	0,8529
143	Wonosari	Wonosari	0,8854	0,9140	0,8473	0,8473	0,8435
144	Wonosari	Wunung	0,6711	0,7735	0,7754	0,7754	0,8184

2. Dana Desa (DD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Desa	Dana Desa (DD) (Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Gedangsari	Hargomulyo	1.125.386.000	1.182.520.000	1.144.073.000	1.164.225.000	1.359.130.000
2	Gedangsari	Mertelu	1.031.149.000	1.218.348.000	1.009.910.000	1.022.969.000	1.168.815.000
3	Gedangsari	Ngalang	1.146.294.000	1.229.104.000	1.198.232.000	1.452.559.000	1.702.446.000
4	Gedangsari	Sampang	826.106.000	845.064.000	843.208.000	1.077.678.000	1.270.686.000
5	Gedangsari	Serut	888.153.000	1.061.779.000	962.774.000	959.554.000	1.237.422.000
6	Gedangsari	Tegalrejo	1.143.282.000	1.217.919.000	1.220.078.000	1.237.673.000	2.383.243.000
7	Gedangsari	Watugajah	876.358.000	899.984.000	880.277.000	1.127.663.000	1.248.155.000
8	Girisubo	Balong	1.040.984.000	1.078.416.000	1.295.050.000	1.023.387.000	1.017.590.000
9	Girisubo	Jepitu	953.369.000	978.493.000	958.944.000	956.229.000	962.791.000
10	Girisubo	Jerukwudel	799.908.000	824.470.000	856.470.000	772.608.000	776.749.000
11	Girisubo	Karangawen	827.209.000	820.427.000	800.346.000	737.026.000	775.716.000
12	Girisubo	Nglindur	832.397.000	830.063.000	824.035.000	779.041.000	865.899.000
13	Girisubo	Pucung	906.697.000	939.950.000	926.781.000	893.886.000	1.216.544.000
14	Girisubo	Songbanyu	1.068.194.000	1.112.222.000	1.072.900.000	1.055.481.000	1.324.488.000
15	Girisubo	Tileng	889.288.000	923.739.000	1.215.788.000	1.130.575.000	1.119.632.000
16	Karangmojo	Bejiharjo	1.076.446.000	1.106.675.000	1.231.145.000	1.237.662.000	2.205.298.000
17	Karangmojo	Bendungan	796.856.000	799.873.000	773.556.000	725.046.000	832.505.000
18	Karangmojo	Gedangrejo	899.204.000	927.289.000	959.888.000	984.188.000	1.161.766.000
19	Karangmojo	Jatiayu	947.933.000	981.758.000	1.020.870.000	1.022.017.000	1.460.671.000
20	Karangmojo	Karangmojo	1.005.747.000	1.040.707.000	1.079.155.000	1.100.110.000	1.642.252.000
21	Karangmojo	Kelor	759.939.000	771.576.000	753.639.000	774.623.000	878.766.000
22	Karangmojo	Ngawis	832.689.000	827.624.000	804.583.000	830.345.000	1.021.823.000
23	Karangmojo	Ngipak	815.343.000	833.365.000	800.809.000	821.626.000	913.406.000
24	Karangmojo	Wiladeg	802.487.000	813.660.000	810.932.000	818.237.000	938.228.000
25	Ngawen	Beji	931.982.000	992.456.000	960.321.000	970.008.000	1.127.262.000
26	Ngawen	Jurangjero	949.247.000	995.943.000	1.243.902.000	967.701.000	1.154.119.000
27	Ngawen	Kampung	893.265.000	904.273.000	1.000.821.000	987.886.000	1.175.151.000
28	Ngawen	Sambirejo	936.808.000	953.710.000	1.025.272.000	1.021.879.000	1.473.759.000
29	Ngawen	Tancep	889.952.000	907.719.000	965.266.000	982.450.000	1.484.160.000
30	Ngawen	Watusigar	917.949.000	945.783.000	991.353.000	1.239.614.000	1.212.597.000
31	Nglipar	Katongan	932.065.000	977.116.000	997.365.000	972.302.000	1.200.308.000
32	Nglipar	Kedungkeris	879.354.000	876.896.000	850.873.000	1.087.078.000	1.027.968.000
33	Nglipar	Kedungpoh	930.331.000	958.010.000	1.272.396.000	983.628.000	1.518.775.000
34	Nglipar	Natah	1.011.596.000	1.058.273.000	972.977.000	1.017.462.000	1.459.403.000
35	Nglipar	Nglipar	1.006.829.000	1.039.008.000	968.795.000	978.341.000	997.491.000
36	Nglipar	Pengkol	1.255.050.000	1.256.583.000	1.086.575.000	1.102.618.000	1.337.500.000
37	Nglipar	Pilangrejo	953.340.000	1.013.296.000	927.586.000	962.321.000	1.057.435.000

No	Kecamatan	Desa	Dana Desa (DD) (Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
38	Paliyan	Giring	842.020.000	851.957.000	851.870.000	772.820.000	862.994.000
39	Paliyan	Grogol	808.905.000	829.611.000	804.460.000	752.776.000	833.722.000
40	Paliyan	Karangasem	1.025.068.000	1.067.721.000	1.101.588.000	1.094.018.000	1.330.990.000
41	Paliyan	Karangduwet	1.053.880.000	1.078.905.000	1.108.357.000	1.336.060.000	1.063.651.000
42	Paliyan	Mulusan	891.306.000	908.958.000	957.726.000	950.778.000	1.212.166.000
43	Paliyan	Pampang	844.486.000	871.896.000	849.268.000	804.053.000	1.189.953.000
44	Paliyan	Sodo	932.118.000	957.724.000	918.440.000	945.023.000	1.058.331.000
45	Panggang	Giriharjo	959.204.000	987.602.000	956.344.000	956.220.000	1.182.309.000
46	Panggang	Girikarto	971.277.000	1.012.920.000	972.545.000	959.357.000	1.230.755.000
47	Panggang	Girimulyo	1.071.637.000	1.104.068.000	1.155.062.000	1.139.417.000	1.115.757.000
48	Panggang	Girisekar	1.117.015.000	1.151.583.000	1.188.950.000	1.161.100.000	1.281.400.000
49	Panggang	Girisuko	998.572.000	1.048.469.000	1.105.152.000	1.022.482.000	1.223.733.000
50	Panggang	Giriwungu	951.179.000	984.631.000	944.017.000	868.125.000	854.142.000
51	Patuk	Beji	789.893.000	794.116.000	779.534.000	950.783.000	842.852.000
52	Patuk	Bunder	798.156.000	808.761.000	786.292.000	803.011.000	1.083.468.000
53	Patuk	Nglanggeran	793.611.000	809.479.000	793.011.000	995.856.000	807.283.000
54	Patuk	Nglegi	867.962.000	883.847.000	884.006.000	874.088.000	1.028.521.000
55	Patuk	Ngoro-oro	817.687.000	837.108.000	826.562.000	820.862.000	901.674.000
56	Patuk	Patuk	761.243.000	758.476.000	744.368.000	705.461.000	1.005.477.000
57	Patuk	Pengkok	789.088.000	807.492.000	1.076.402.000	807.286.000	991.826.000
58	Patuk	Putat	837.732.000	856.234.000	820.526.000	834.015.000	994.070.000
59	Patuk	Salam	827.149.000	824.656.000	801.798.000	789.837.000	900.380.000
60	Patuk	Semoyo	799.405.000	814.067.000	817.223.000	752.536.000	954.599.000
61	Patuk	Terbah	821.276.000	843.980.000	830.728.000	765.416.000	963.851.000
62	Playen	Banaran	847.881.000	861.279.000	865.238.000	881.383.000	1.035.117.000
63	Playen	Bandung	768.191.000	762.225.000	739.994.000	761.884.000	903.754.000
64	Playen	Banyusoco	1.001.448.000	1.164.932.000	1.068.272.000	1.033.920.000	1.134.668.000
65	Playen	Bleberan	908.168.000	961.484.000	1.014.933.000	974.617.000	1.214.142.000
66	Playen	Dengok	805.437.000	828.596.000	822.118.000	764.360.000	895.766.000
67	Playen	Gading	880.331.000	1.026.836.000	949.190.000	927.498.000	1.215.506.000
68	Playen	Getas	882.443.000	1.049.571.000	966.619.000	962.291.000	1.156.710.000
69	Playen	Logandeng	843.308.000	840.672.000	1.185.032.000	929.046.000	1.126.594.000
70	Playen	Ngawu	781.108.000	929.718.000	783.172.000	801.664.000	982.657.000
71	Playen	Ngleri	827.146.000	870.373.000	848.278.000	778.467.000	954.848.000
72	Playen	Ngunut	796.962.000	791.286.000	791.818.000	973.366.000	836.903.000
73	Playen	Playen	801.527.000	807.384.000	779.863.000	800.018.000	910.447.000
74	Playen	Plembutan	850.617.000	849.366.000	826.822.000	1.093.943.000	1.238.332.000
75	Ponjong	Bedoyo	920.681.000	936.726.000	907.182.000	917.514.000	1.168.495.000
76	Ponjong	Genjahan	836.741.000	859.597.000	906.686.000	940.096.000	1.435.322.000
77	Ponjong	Gombang	938.093.000	1.007.063.000	945.012.000	969.444.000	1.259.987.000
78	Ponjong	Karangasem	839.972.000	861.086.000	845.386.000	784.675.000	1.138.123.000
79	Ponjong	Kenteng	884.121.000	909.216.000	884.906.000	889.770.000	1.065.676.000
80	Ponjong	Ponjong	884.409.000	910.390.000	961.095.000	974.553.000	997.353.000
81	Ponjong	Sawahan	1.025.698.000	1.192.716.000	1.084.107.000	1.088.849.000	1.342.705.000
82	Ponjong	Sidorejo	1.177.779.000	1.254.127.000	1.215.096.000	1.244.093.000	2.069.226.000
83	Ponjong	Sumbergiri	937.034.000	969.007.000	933.758.000	937.107.000	1.073.834.000
84	Ponjong	Tambakromo	1.015.442.000	1.057.133.000	1.001.795.000	1.255.512.000	1.170.124.000
85	Ponjong	Umbulrejo	960.110.000	990.530.000	1.047.019.000	1.037.322.000	1.583.394.000
86	Purwosari	Giriasih	1.097.743.000	1.102.855.000	1.219.663.000	813.646.000	920.834.000
87	Purwosari	Giricahyo	861.550.000	882.499.000	901.835.000	853.540.000	1.145.264.000
88	Purwosari	Girijati	1.054.111.000	1.077.666.000	1.143.167.000	784.080.000	1.109.043.000
89	Purwosari	Giripurwo	1.246.946.000	1.317.239.000	1.311.830.000	1.273.670.000	2.038.499.000
90	Purwosari	Giritirto	931.284.000	922.987.000	901.830.000	897.390.000	1.114.834.000
91	Rongkop	Bohol	819.693.000	829.205.000	813.478.000	701.057.000	756.384.000
92	Rongkop	Botodayaan	965.780.000	996.364.000	969.892.000	961.918.000	1.295.741.000
93	Rongkop	Karangwuni	874.450.000	874.120.000	854.384.000	851.516.000	1.050.127.000
94	Rongkop	Melikan	1.154.112.000	978.893.000	939.764.000	951.712.000	1.036.407.000
95	Rongkop	Petir	946.747.000	947.743.000	943.474.000	942.827.000	1.025.183.000

No	Kecamatan	Desa	Dana Desa (DD) (Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
96	Rongkop	Pringombo	912.954.000	941.361.000	929.436.000	925.214.000	1.075.766.000
97	Rongkop	Pucanganom	948.281.000	971.724.000	976.401.000	963.972.000	1.199.415.000
98	Rongkop	Semugih	892.963.000	896.987.000	881.442.000	861.528.000	1.000.423.000
99	Saptosari	Jetis	952.365.000	1.124.815.000	999.117.000	1.024.327.000	1.521.639.000
100	Saptosari	Kanigoro	1.096.459.000	1.168.589.000	1.191.720.000	1.147.242.000	1.578.441.000
101	Saptosari	Kepek	1.336.158.000	1.441.148.000	1.374.799.000	1.414.016.000	1.488.147.000
102	Saptosari	Krambilsawit	1.167.517.000	1.243.469.000	1.233.061.000	1.239.461.000	1.664.570.000
103	Saptosari	Monggol	973.385.000	1.014.352.000	979.848.000	1.051.836.000	1.582.259.000
104	Saptosari	Ngloro	936.075.000	989.630.000	937.897.000	958.865.000	1.273.746.000
105	Saptosari	Planjan	1.113.731.000	1.342.456.000	1.196.821.000	1.198.676.000	1.583.238.000
106	Semanu	Candirejo	1.097.191.000	1.155.091.000	1.169.532.000	1.145.161.000	1.407.136.000
107	Semanu	Dadapayu	1.127.801.000	1.182.590.000	1.210.249.000	1.197.366.000	1.805.218.000
108	Semanu	Ngeposari	1.146.800.000	1.202.125.000	1.274.766.000	1.283.041.000	1.559.620.000
109	Semanu	Pacarejo	1.324.374.000	1.414.804.000	1.483.854.000	1.713.969.000	2.697.326.000
110	Semanu	Semanu	1.266.272.000	1.333.016.000	1.381.679.000	1.423.373.000	2.348.580.000
111	Semin	Bendung	856.612.000	881.788.000	1.149.209.000	882.433.000	1.322.547.000
112	Semin	Bulurejo	902.679.000	924.700.000	1.191.867.000	926.242.000	964.890.000
113	Semin	Candirejo	1.013.827.000	1.062.911.000	1.103.629.000	1.113.025.000	1.356.541.000
114	Semin	Kalitekuk	896.483.000	944.928.000	894.258.000	917.456.000	1.055.694.000
115	Semin	Karangsari	970.513.000	1.002.108.000	1.059.578.000	1.065.856.000	1.301.109.000
116	Semin	Kemejing	916.217.000	946.397.000	1.193.072.000	939.991.000	1.120.755.000
117	Semin	Pundungsari	908.576.000	932.764.000	896.608.000	925.443.000	1.155.753.000
118	Semin	Rejosari	949.763.000	971.257.000	1.031.157.000	1.033.731.000	1.148.563.000
119	Semin	Semin	1.039.186.000	1.186.660.000	1.177.194.000	1.166.680.000	1.456.988.000
120	Semin	Sumberejo	887.168.000	916.301.000	1.254.079.000	971.805.000	1.459.661.000
121	Tanjungsari	Banjarejo	1.056.202.000	1.170.033.000	1.195.153.000	1.363.919.000	1.185.031.000
122	Tanjungsari	Hargosari	1.086.536.000	1.145.156.000	1.149.899.000	1.142.129.000	1.220.621.000
123	Tanjungsari	Kemadang	1.045.864.000	1.095.404.000	1.106.888.000	1.325.831.000	1.175.030.000
124	Tanjungsari	Kemiri	1.030.349.000	1.077.300.000	993.700.000	1.007.822.000	1.400.029.000
125	Tanjungsari	Ngestirejo	1.079.792.000	1.139.578.000	1.151.725.000	1.129.881.000	1.260.340.000
126	Tepus	Giripanggung	1.032.485.000	1.085.336.000	1.391.170.000	1.070.897.000	1.497.094.000
127	Tepus	Purwodadi	1.217.272.000	1.277.678.000	1.275.693.000	1.504.896.000	1.537.215.000
128	Tepus	Sidoharjo	1.090.180.000	1.127.865.000	1.426.711.000	1.136.144.000	1.511.895.000
129	Tepus	Sumberwungu	1.119.804.000	1.160.183.000	1.198.142.000	1.168.876.000	1.800.113.000
130	Tepus	Tepus	1.212.512.000	1.280.819.000	1.268.560.000	1.464.129.000	1.652.138.000
131	Wonosari	Baleharjo	789.824.000	799.553.000	864.388.000	1.109.551.000	1.072.281.000
132	Wonosari	Duwet	839.480.000	974.862.000	812.045.000	763.430.000	780.931.000
133	Wonosari	Gari	871.178.000	887.116.000	1.258.197.000	1.220.197.000	1.300.200.000
134	Wonosari	Karangrejek	826.160.000	975.278.000	905.402.000	1.160.786.000	1.090.564.000
135	Wonosari	Karantengah	1.084.129.000	1.145.838.000	1.117.117.000	1.167.146.000	1.539.267.000
136	Wonosari	Kepek	860.323.000	860.056.000	991.485.000	1.025.589.000	1.158.165.000
137	Wonosari	Mulo	879.435.000	1.043.487.000	946.162.000	1.214.044.000	1.037.451.000
138	Wonosari	Piyaman	843.095.000	861.475.000	917.816.000	928.577.000	1.358.814.000
139	Wonosari	Pulutan	842.823.000	854.847.000	832.759.000	835.637.000	1.018.232.000
140	Wonosari	Selang	798.499.000	802.198.000	766.393.000	1.044.625.000	955.584.000
141	Wonosari	Siraman	807.520.000	816.223.000	869.512.000	887.070.000	1.027.113.000
142	Wonosari	Wareng	832.705.000	844.982.000	826.429.000	838.350.000	943.013.000
143	Wonosari	Wonosari	772.920.000	812.331.000	828.666.000	867.917.000	1.070.021.000
144	Wonosari	Wunung	883.582.000	933.198.000	1.195.242.000	906.141.000	1.103.914.000

3. Alokasi Dana Desa(ADD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Dana Desa (ADD) (Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Gedangsari	Hargomulyo	760.682.500	830.683.000	865.537.100	880.647.000	904.593.800
2	Gedangsari	Mertelu	698.891.700	719.557.200	698.082.400	713.743.100	782.757.900
3	Gedangsari	Ngalang	746.309.400	830.021.000	815.711.700	830.935.200	904.746.800
4	Gedangsari	Sampang	654.631.500	609.803.500	591.945.300	598.064.700	662.867.700
5	Gedangsari	Serut	801.439.500	639.329.200	692.489.600	705.754.700	694.597.100
6	Gedangsari	Tegalrejo	770.263.100	751.143.600	764.985.200	772.733.700	815.721.100
7	Gedangsari	Watugajah	678.989.300	586.211.100	572.737.000	577.991.700	637.264.600
8	Girisubo	Balong	669.743.000	690.468.500	646.839.300	658.586.100	752.832.800
9	Girisubo	Jepitu	696.969.200	719.280.200	678.214.100	684.604.900	780.626.600
10	Girisubo	Jerukwudel	606.010.200	653.243.600	630.016.500	633.255.000	710.929.900
11	Girisubo	Karangawen	624.616.200	654.680.100	678.368.500	683.465.600	710.402.600
12	Girisubo	Nglindur	628.133.600	654.880.900	685.394.500	690.158.200	715.683.300
13	Girisubo	Pucung	674.918.900	718.473.100	727.893.900	735.366.300	782.116.000
14	Girisubo	Songbanyu	701.398.600	800.767.000	850.810.800	864.069.300	866.268.900
15	Girisubo	Tileng	717.192.600	880.659.700	917.020.200	931.343.600	962.772.600
16	Karangmojo	Bejiharjo	860.163.900	997.905.700	1.072.961.000	1.103.057.700	1.102.048.900
17	Karangmojo	Bendungan	607.338.300	572.786.700	569.050.100	574.765.700	621.361.800
18	Karangmojo	Gedangrejo	680.835.300	772.085.700	800.516.900	818.836.000	842.821.100
19	Karangmojo	Jatiayu	722.733.700	801.792.700	840.537.000	851.799.000	875.827.600
20	Karangmojo	Karangmojo	750.572.700	882.376.800	946.803.400	964.558.800	968.019.900
21	Karangmojo	Kelor	618.479.400	633.502.600	633.904.100	648.457.000	691.891.100
22	Karangmojo	Ngawis	654.201.700	771.700.300	754.615.400	765.260.400	840.748.000
23	Karangmojo	Ngipak	631.772.500	688.332.200	690.141.500	705.175.300	751.548.600
24	Karangmojo	Wiladeg	640.274.200	715.662.100	695.560.500	710.582.200	782.861.200
25	Ngawen	Beji	688.872.000	825.257.300	827.109.000	842.386.000	899.042.600
26	Ngawen	Jurangjero	671.840.300	664.716.000	648.376.000	659.348.700	723.940.900
27	Ngawen	Kampung	687.270.700	853.178.000	811.403.800	827.927.600	931.867.300
28	Ngawen	Sambirejo	702.540.400	693.319.700	695.209.800	710.403.900	752.452.700
29	Ngawen	Tancep	669.482.900	666.575.200	646.151.800	654.292.400	720.651.100
30	Ngawen	Watusigar	675.793.700	770.796.000	742.670.400	761.192.400	837.012.400
31	Nglipar	Katongan	697.400.300	612.503.800	624.020.600	631.460.800	667.901.600
32	Nglipar	Kedungkeris	682.094.600	639.385.300	647.617.100	654.329.800	693.807.700
33	Nglipar	Kedungpoh	708.223.500	720.276.400	706.316.800	715.147.500	784.337.000
34	Nglipar	Natah	686.688.200	638.936.800	698.133.000	706.276.100	695.965.300
35	Nglipar	Nglipar	684.388.100	612.165.100	623.231.000	629.691.700	666.837.300
36	Nglipar	Pengkol	706.579.300	720.157.700	702.761.100	717.336.600	785.393.200
37	Nglipar	Pilangrejo	680.836.000	639.038.600	624.307.300	629.219.700	693.941.900
38	Paliyan	Giring	643.618.100	689.641.500	712.416.300	730.333.400	750.675.800
39	Paliyan	Grogol	610.372.300	600.322.000	578.226.800	580.152.400	653.034.600
40	Paliyan	Karangasem	719.731.000	748.025.100	757.715.800	770.556.600	815.329.100
41	Paliyan	Karangduwet	716.765.000	666.149.000	651.716.300	661.387.000	726.412.900
42	Paliyan	Mulusan	664.842.200	610.958.100	617.138.300	624.416.500	663.286.900
43	Paliyan	Pampang	619.266.700	574.393.600	553.573.300	553.724.000	623.988.100
44	Paliyan	Sodo	648.803.100	580.671.200	582.324.700	595.426.100	634.013.000
45	Panggang	Giriharjo	677.903.400	609.014.500	609.328.600	622.156.000	661.996.600
46	Panggang	Girikarto	685.578.200	664.912.500	716.338.900	731.609.000	723.378.200
47	Panggang	Girimulyo	704.536.900	638.629.200	694.136.800	710.715.200	698.585.600
48	Panggang	Girisekar	756.620.300	694.714.700	750.022.900	772.514.500	760.760.100
49	Panggang	Girisuko	762.086.100	697.021.700	738.524.600	746.796.000	755.398.000
50	Panggang	Giriwungu	655.167.600	575.010.300	632.352.700	636.567.600	630.069.100
51	Patuk	Beji	612.226.200	600.020.200	570.965.500	578.779.600	651.334.700
52	Patuk	Bunder	636.242.500	636.334.500	656.449.300	672.008.100	688.986.100
53	Patuk	Nglanggeran	614.568.100	572.834.400	520.879.100	524.117.600	620.649.500
54	Patuk	Nglegi	662.908.200	692.101.700	676.427.000	682.434.800	751.864.100
55	Patuk	Ngoro-oro	638.725.800	689.759.200	693.467.900	708.408.800	753.219.400
56	Patuk	Patuk	597.212.800	545.589.800	567.219.900	575.581.000	594.595.700

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)				
			(Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
57	Patuk	Pengkok	617.074.200	609.051.400	612.693.700	622.901.900	662.924.900
58	Patuk	Putat	645.385.000	689.942.300	645.612.500	656.068.100	751.332.900
59	Patuk	Salam	617.351.700	608.321.900	588.491.500	597.487.800	662.986.500
60	Patuk	Semoyo	615.309.000	575.217.600	555.493.900	554.678.400	624.344.500
61	Patuk	Terbah	638.941.500	603.009.100	629.494.100	634.656.300	654.944.700
62	Playen	Banaran	659.563.700	691.385.100	697.258.000	711.800.300	754.928.100
63	Playen	Bandung	619.528.200	661.018.700	639.757.300	653.411.900	722.839.100
64	Playen	Banyusoco	745.714.900	669.069.900	658.525.100	666.707.100	728.967.400
65	Playen	Bleberan	723.135.500	748.902.200	737.258.700	754.818.600	821.295.600
66	Playen	Dengok	613.347.400	600.764.800	598.481.700	604.022.200	651.597.400
67	Playen	Gading	693.633.900	719.767.400	730.911.000	754.694.400	794.561.700
68	Playen	Getas	677.099.400	611.716.500	596.404.700	603.184.200	665.630.800
69	Playen	Logandeng	692.607.800	718.632.400	747.488.000	768.611.000	787.025.000
70	Playen	Ngawu	598.079.800	552.826.000	524.143.100	538.507.200	601.160.000
71	Playen	Ngleri	650.232.900	655.238.200	682.948.600	688.525.400	714.029.900
72	Playen	Ngunut	593.854.800	520.098.100	495.301.500	497.013.300	563.710.700
73	Playen	Playen	636.736.500	636.303.900	617.932.600	626.447.500	693.022.800
74	Playen	Plembutan	680.873.000	744.677.700	724.132.100	736.946.300	810.372.400
75	Ponjong	Bedoyo	664.984.200	689.452.200	660.413.700	675.780.500	746.997.200
76	Ponjong	Genjahan	646.953.000	743.864.900	725.516.300	742.717.300	814.939.400
77	Ponjong	Gombang	654.578.800	690.058.700	645.883.900	652.260.600	748.755.000
78	Ponjong	Karangasem	623.714.700	681.544.200	634.419.800	639.316.500	741.905.500
79	Ponjong	Kenteng	652.847.300	690.309.100	694.749.900	705.545.600	751.123.800
80	Ponjong	Ponjong	649.136.000	743.969.600	748.262.000	764.335.200	812.559.300
81	Ponjong	Sawahan	710.152.200	721.110.500	708.261.200	714.610.000	783.695.400
82	Ponjong	Sidorejo	773.351.000	964.737.000	954.087.900	974.424.400	1.056.264.100
83	Ponjong	Sumbergiri	674.922.600	745.124.400	754.233.000	766.569.000	814.099.800
84	Ponjong	Tambakromo	684.337.500	745.112.600	702.644.200	716.357.100	813.255.000
85	Ponjong	Umbulrejo	714.457.400	719.486.900	704.476.600	715.720.400	784.987.200
86	Purwosari	Giriasih	612.299.800	548.141.100	544.107.600	546.239.700	590.037.400
87	Purwosari	Giricahyo	672.707.200	638.565.600	645.706.400	654.578.700	694.252.200
88	Purwosari	Girijati	592.028.900	545.405.800	589.292.400	599.669.500	593.960.800
89	Purwosari	Giripurwo	800.760.600	726.554.400	740.174.100	758.652.300	794.017.700
90	Purwosari	Giritirto	675.466.900	639.275.100	676.419.900	687.710.200	700.229.500
91	Rongkop	Bohol	606.528.200	654.478.200	629.615.600	632.919.100	709.842.900
92	Rongkop	Botodayaan	716.588.600	1.016.656.600	1.029.318.700	1.045.078.800	1.109.886.800
93	Rongkop	Karangwuni	661.920.000	717.238.900	699.236.300	709.734.700	781.760.500
94	Rongkop	Melikan	664.342.200	797.400.300	778.736.800	787.007.500	866.751.300
95	Rongkop	Petir	679.730.400	799.212.800	776.404.000	788.214.200	866.052.600
96	Rongkop	Pringombo	680.720.200	718.115.900	701.280.700	711.031.400	782.326.900
97	Rongkop	Pucanganom	697.073.200	771.541.200	831.586.400	847.787.900	846.881.800
98	Rongkop	Semugih	700.567.000	800.512.100	760.210.100	771.128.000	871.420.500
99	Saptosari	Jetis	660.223.000	609.664.300	655.846.700	679.241.600	666.320.000
100	Saptosari	Kanigoro	775.689.400	723.334.900	790.788.300	796.630.700	788.681.500
101	Saptosari	Kepek	700.492.900	609.184.900	654.729.100	678.260.800	665.829.000
102	Saptosari	Krambilsawit	719.926.200	692.661.600	755.073.900	766.733.200	758.934.300
103	Saptosari	Monggol	681.803.200	690.558.100	695.330.300	712.943.400	755.971.100
104	Saptosari	Ngloro	640.944.600	607.543.900	638.239.200	649.472.300	665.281.400
105	Saptosari	Planjan	728.177.200	827.278.000	860.879.000	879.858.900	905.668.800
106	Semanu	Candirejo	790.869.200	994.184.600	1.028.669.300	1.049.001.100	1.082.257.400
107	Semanu	Dadapayu	776.913.200	993.084.500	1.003.603.300	1.025.092.500	1.083.448.600
108	Semanu	Ngeposari	797.396.500	966.905.100	975.085.500	995.348.300	1.051.833.100
109	Semanu	Pacarejo	935.312.500	1.217.313.500	1.220.777.400	1.242.545.600	1.331.319.800
110	Semanu	Semanu	843.933.700	969.309.300	983.968.700	1.014.774.500	1.070.410.700
111	Semin	Bendung	668.072.700	691.209.100	648.565.600	655.874.400	750.773.400
112	Semin	Bulurejo	644.681.000	636.438.100	618.245.500	626.854.100	693.248.300
113	Semin	Candirejo	724.361.000	692.731.200	703.674.800	716.586.000	758.104.900
114	Semin	Kalitekuk	673.427.200	718.450.800	698.782.200	712.680.700	782.869.200

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Dana Desa (ADD) (Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
115	Semin	Karangsari	715.082.200	801.818.600	789.036.300	804.617.100	876.990.000
116	Semin	Kemejing	661.901.700	745.096.200	728.386.500	739.495.300	812.373.200
117	Semin	Pundungsari	689.556.900	719.185.600	703.774.100	714.581.000	784.330.000
118	Semin	Rejosari	701.820.300	855.924.800	843.587.300	857.160.700	934.110.000
119	Semin	Semin	773.097.300	884.280.900	870.621.100	892.000.900	967.496.100
120	Semin	Sumberejo	694.301.900	880.149.400	864.269.300	881.935.800	962.633.100
121	Tanjungsari	Banjarejo	743.552.000	1.016.406.700	1.002.959.200	1.022.932.700	1.111.521.700
122	Tanjungsari	Hargosari	688.407.700	691.442.100	748.952.300	768.648.100	760.181.500
123	Tanjungsari	Kemadang	759.047.900	910.868.200	945.093.200	960.938.800	991.589.000
124	Tanjungsari	Kemiri	694.344.600	744.887.000	805.240.700	820.782.900	817.697.400
125	Tanjungsari	Ngestirejo	709.336.900	799.852.300	832.734.900	850.441.200	875.138.000
126	Tepus	Giripanggung	738.942.700	829.400.100	840.045.000	854.193.300	904.150.300
127	Tepus	Purwodadi	780.023.100	965.566.000	956.020.400	969.982.900	1.053.021.500
128	Tepus	Sidoharjo	711.891.300	746.521.700	809.051.400	822.981.400	818.607.800
129	Tepus	Sumberwungu	758.211.500	964.511.000	1.021.066.000	1.048.149.100	1.055.221.200
130	Tepus	Tepus	834.812.500	995.858.900	1.068.189.800	1.084.931.900	1.090.660.400
131	Wonosari	Baleharjo	629.644.700	580.128.300	532.787.800	552.408.700	634.188.600
132	Wonosari	Duwet	652.349.600	599.912.500	577.272.200	580.127.100	653.156.900
133	Wonosari	Gari	661.439.800	691.248.400	674.437.700	685.357.000	755.102.100
134	Wonosari	Karangrejek	643.118.900	636.100.200	591.677.200	603.134.400	692.662.900
135	Wonosari	Karangtengah	685.727.700	718.093.000	720.449.900	734.231.300	785.401.300
136	Wonosari	Kepek	681.599.600	717.742.800	700.410.900	717.335.000	786.656.100
137	Wonosari	Mulo	644.656.400	527.703.000	585.266.400	599.805.300	582.272.800
138	Wonosari	Piyaman	671.429.700	744.614.700	727.264.200	743.312.900	814.881.800
139	Wonosari	Pulutan	646.316.200	690.310.100	672.250.600	685.211.700	754.324.000
140	Wonosari	Selang	625.415.000	688.664.900	668.415.400	680.904.900	752.611.700
141	Wonosari	Siraman	629.016.700	608.063.600	587.889.300	607.182.600	664.937.400
142	Wonosari	Wareng	621.941.400	607.133.400	585.721.000	596.543.700	662.760.900
143	Wonosari	Wonosari	648.668.000	634.225.200	609.807.900	639.979.700	702.307.000
144	Wonosari	Wunung	665.695.200	582.918.800	590.843.000	598.227.900	635.560.900

4. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kalurahan Kabupaten
Gunungkidul tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Desa	BKK DAIS Kalurahan (Rupiah)		
			2021	2022	2023
1	Gedangsari	Hargomulyo	112.790.500	-	125.000.000
2	Gedangsari	Mertelu	50.000.000	238.000.000	100.000.000
3	Gedangsari	Ngalang	50.000.000	563.000.000	2.197.460.000
4	Gedangsari	Sampang	50.000.000	63.000.000	125.000.000
5	Gedangsari	Serut	50.000.000	63.000.000	100.000.000
6	Gedangsari	Tegalrejo	50.000.000	63.000.000	250.000.000
7	Gedangsari	Watugajah	50.000.000	63.000.000	525.000.000
8	Girisubo	Balong	50.000.000	63.000.000	975.000.000
9	Girisubo	Jepitu	277.790.500	175.000.000	75.000.000
10	Girisubo	Jerukwudel	365.000.000	1.563.000.000	850.000.000

No	Kecamatan	Desa	BKK DAIS Kalurahan (Rupiah)		
			2021	2022	2023
11	Girisubo	Karangawen	50.000.000	63.000.000	300.000.000
12	Girisubo	Nglindur	50.000.000	63.000.000	250.000.000
13	Girisubo	Pucung	50.000.000	63.000.000	325.000.000
14	Girisubo	Songbanyu	55.000.000	238.000.000	125.000.000
15	Girisubo	Tileng	550.000.000	988.000.000	75.000.000
16	Karangmojo	Bejiharjo	1.075.000.000	2.983.200.000	925.000.000
17	Karangmojo	Bendungan	75.000.000	63.000.000	225.000.000
18	Karangmojo	Gedangrejo	75.000.000	988.000.000	225.000.000
19	Karangmojo	Jatiayu	50.000.000	63.000.000	125.000.000
20	Karangmojo	Karangmojo	50.000.000	63.000.000	75.000.000
21	Karangmojo	Kelor	75.000.000	238.000.000	125.000.000
22	Karangmojo	Ngawis	50.000.000	63.000.000	125.000.000
23	Karangmojo	Ngipak	75.000.000	63.000.000	75.000.000
24	Karangmojo	Wiladeg	137.790.500	500.000.000	625.000.000
25	Ngawen	Beji	112.790.500	675.000.000	450.000.000
26	Ngawen	Jurangjero	55.000.000	63.000.000	75.000.000
27	Ngawen	Kampung	55.000.000	63.000.000	125.000.000
28	Ngawen	Sambirejo	50.000.000	238.000.000	200.000.000
29	Ngawen	Tancep	75.000.000	63.000.000	200.000.000
30	Ngawen	Watusigar	55.000.000	238.000.000	50.000.000
31	Nglipar	Katongan	50.000.000	638.000.000	1.325.000.000
32	Nglipar	Kedungkeris	50.000.000	63.000.000	350.000.000
33	Nglipar	Kedungpoh	50.000.000	63.000.000	1.050.000.000
34	Nglipar	Natah	295.000.000	238.000.000	175.000.000
35	Nglipar	Nglipar	50.000.000	63.000.000	200.000.000
36	Nglipar	Pengkol	75.000.000	238.000.000	125.000.000
37	Nglipar	Pilangrejo	112.790.500	175.000.000	300.000.000
38	Paliyan	Giring	50.000.000	1.063.000.000	775.000.000
39	Paliyan	Grogol	50.000.000	63.000.000	275.000.000
40	Paliyan	Karangasem	50.000.000	63.000.000	125.000.000
41	Paliyan	Karangduwet	112.790.500	-	75.000.000
42	Paliyan	Mulusan	50.000.000	63.000.000	100.000.000
43	Paliyan	Pampang	50.000.000	63.000.000	50.000.000
44	Paliyan	Sodo	50.000.000	63.000.000	100.000.000
45	Panggang	Giriharjo	50.000.000	238.000.000	150.000.000

No	Kecamatan	Desa	BKK DAIS Kalurahan (Rupiah)		
			2021	2022	2023
46	Panggang	Girikarto	50.000.000	813.000.000	775.000.000
47	Panggang	Girimulyo	50.000.000	63.000.000	225.000.000
48	Panggang	Girisekar	112.790.500	175.000.000	350.000.000
49	Panggang	Girisuko	215.000.000	238.000.000	25.000.000
50	Panggang	Giriwungu	50.000.000	63.000.000	100.000.000
51	Patuk	Beji	75.000.000	63.000.000	200.000.000
52	Patuk	Bunder	137.790.500	-	725.000.000
53	Patuk	Nglanggeran	75.000.000	63.000.000	100.000.000
54	Patuk	Nglegi	75.000.000	63.000.000	100.000.000
55	Patuk	Ngoro-oro	80.000.000	63.000.000	25.000.000
56	Patuk	Patuk	75.000.000	63.000.000	50.000.000
57	Patuk	Pengkok	80.000.000	63.000.000	50.000.000
58	Patuk	Putat	1.075.000.000	2.983.200.000	1.275.000.000
59	Patuk	Salam	75.000.000	238.000.000	50.000.000
60	Patuk	Semoyo	75.000.000	63.000.000	50.000.000
61	Patuk	Terbah	75.000.000	63.000.000	75.000.000
62	Playen	Banaran	75.000.000	238.000.000	75.000.000
63	Playen	Bandung	75.000.000	63.000.000	100.000.000
64	Playen	Banyusoco	467.790.500	175.000.000	375.000.000
65	Playen	Bleberan	75.000.000	313.000.000	275.000.000
66	Playen	Dengok	75.000.000	63.000.000	225.000.000
67	Playen	Gading	75.000.000	63.000.000	225.000.000
68	Playen	Getas	75.000.000	63.000.000	-
69	Playen	Logandeng	75.000.000	238.000.000	425.000.000
70	Playen	Ngawu	75.000.000	63.000.000	25.000.000
71	Playen	Ngleri	75.000.000	63.000.000	50.000.000
72	Playen	Ngunut	75.000.000	238.000.000	50.000.000
73	Playen	Playen	75.000.000	63.000.000	100.000.000
74	Playen	Plembutan	75.000.000	63.000.000	175.000.000
75	Ponjong	Bedoyo	55.000.000	63.000.000	450.000.000
76	Ponjong	Genjahan	50.000.000	63.000.000	300.000.000
77	Ponjong	Gombang	50.000.000	63.000.000	225.000.000
78	Ponjong	Karangasem	50.000.000	63.000.000	300.000.000
79	Ponjong	Kenteng	50.000.000	63.000.000	600.000.000
80	Ponjong	Ponjong	50.000.000	63.000.000	375.000.000

No	Kecamatan	Desa	BKK DAIS Kalurahan (Rupiah)		
			2021	2022	2023
81	Ponjong	Sawahan	112.790.500	-	175.000.000
82	Ponjong	Sidorejo	50.000.000	63.000.000	300.000.000
83	Ponjong	Sumbergiri	50.000.000	63.000.000	200.000.000
84	Ponjong	Tambakromo	50.000.000	63.000.000	200.000.000
85	Ponjong	Umbulrejo	50.000.000	63.000.000	225.000.000
86	Purwosari	Giriasih	50.000.000	238.000.000	375.000.000
87	Purwosari	Giricahyo	50.000.000	63.000.000	50.000.000
88	Purwosari	Girijati	50.000.000	63.000.000	225.000.000
89	Purwosari	Giripurwo	50.000.000	1.858.200.000	275.000.000
90	Purwosari	Giritirto	75.000.000	63.000.000	277.000.000
91	Rongkop	Bohol	75.000.000	63.000.000	25.000.000
92	Rongkop	Botodayaan	112.790.500	-	100.000.000
93	Rongkop	Karangwuni	50.000.000	63.000.000	50.000.000
94	Rongkop	Melikan	75.000.000	63.000.000	550.000.000
95	Rongkop	Petir	50.000.000	63.000.000	50.000.000
96	Rongkop	Pringombo	50.000.000	63.000.000	325.000.000
97	Rongkop	Pucanganom	50.000.000	63.000.000	425.000.000
98	Rongkop	Semugih	50.000.000	63.000.000	50.000.000
99	Saptosari	Jetis	50.000.000	63.000.000	25.000.000
100	Saptosari	Kanigoro	75.000.000	63.000.000	50.000.000
101	Saptosari	Kepek	112.790.500	-	75.000.000
102	Saptosari	Krambilsawit	50.000.000	413.000.000	150.000.000
103	Saptosari	Monggol	50.000.000	63.000.000	75.000.000
104	Saptosari	Ngloro	112.790.500	350.000.000	300.000.000
105	Saptosari	Planjan	112.790.500	-	225.000.000
106	Semanu	Candirejo	75.000.000	63.000.000	300.000.000
107	Semanu	Dadapayu	75.000.000	63.000.000	200.000.000
108	Semanu	Ngeposari	137.790.500	-	450.000.000
109	Semanu	Pacarejo	75.000.000	238.000.000	400.000.000
110	Semanu	Semanu	75.000.000	738.000.000	1.450.000.000
111	Semin	Bendung	112.790.500	750.000.000	1.700.000.000
112	Semin	Bulurejo	50.000.000	63.000.000	210.000.000
113	Semin	Candirejo	50.000.000	238.000.000	250.000.000
114	Semin	Kalitekuk	112.790.500	-	50.000.000
115	Semin	Karangsari	112.790.500	-	75.000.000

No	Kecamatan	Desa	BKK DAIS Kalurahan (Rupiah)		
			2021	2022	2023
116	Semin	Kemejing	112.790.500	-	75.000.000
117	Semin	Pundungsari	112.790.500	-	50.000.000
118	Semin	Rejosari	50.000.000	238.000.000	50.000.000
119	Semin	Semin	112.790.500	500.000.000	800.000.000
120	Semin	Sumberejo	112.790.500	175.000.000	175.000.000
121	Tanjungsari	Banjarejo	50.000.000	238.000.000	475.000.000
122	Tanjungsari	Hargosari	50.000.000	238.000.000	75.000.000
123	Tanjungsari	Kemadang	325.000.000	1.263.000.000	1.025.000.000
124	Tanjungsari	Kemiri	380.000.000	738.000.000	175.000.000
125	Tanjungsari	Ngestirejo	880.000.000	988.000.000	275.000.000
126	Tepus	Giripanggung	75.000.000	63.000.000	50.000.000
127	Tepus	Purwodadi	75.000.000	63.000.000	225.000.000
128	Tepus	Sidoharjo	137.790.500	44.500.000	465.000.000
129	Tepus	Sumberwungu	75.000.000	63.000.000	75.000.000
130	Tepus	Tepus	75.000.000	63.000.000	575.000.000
131	Wonosari	Baleharjo	50.000.000	63.000.000	75.000.000
132	Wonosari	Duwet	112.790.500	175.000.000	100.000.000
133	Wonosari	Gari	112.790.500	175.000.000	275.000.000
134	Wonosari	Karangrejek	112.790.500	175.000.000	175.000.000
135	Wonosari	Karangtengah	50.000.000	238.000.000	125.000.000
136	Wonosari	Kepek	50.000.000	463.000.000	925.000.000
137	Wonosari	Mulo	112.790.500	175.000.000	475.000.000
138	Wonosari	Piyaman	50.000.000	63.000.000	650.000.000
139	Wonosari	Pulutan	50.000.000	63.000.000	75.000.000
140	Wonosari	Selang	112.790.500	-	225.000.000
141	Wonosari	Siraman	75.000.000	63.000.000	75.000.000
142	Wonosari	Wareng	50.000.000	63.000.000	50.000.000
143	Wonosari	Wonosari	50.000.000	63.000.000	300.000.000
144	Wonosari	Wunung	50.000.000	63.000.000	75.000.000

5. Hasil Regresi Model *Fixed Effect*

a. IDM, DD, ADD, BKK DAIS Kal

Dependent Variable: IDM

Method: Panel Least Squares

Date: 12/14/24 Time: 21:07

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 144

Total panel (balanced) observations: 720

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.525030	0.021807	24.07595	0.0000
DD	0.065369	0.011073	5.903677	0.0000
ADD	0.239211	0.033118	7.223075	0.0000
DAIS	0.033572	0.006366	5.274018	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.033325	R-squared	0.735970
Mean dependent var	0.770432	Adjusted R-squared	0.668695
S.D. dependent var	0.064901	S.E. of regression	0.037356
Akaike info criterion	-3.556660	Sum squared resid	0.799619
Schwarz criterion	-2.621730	Log likelihood	1427.398
Hannan-Quinn criter.	-3.195726	F-statistic	10.93978
Durbin-Watson stat	1.502961	Prob(F-statistic)	0.000000

b. IDM, DD, ADD

Dependent Variable: IDM

Method: Panel Least Squares

Date: 12/14/24 Time: 21:38

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 144

Total panel (balanced) observations: 720

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.487822	0.021111	23.10748	0.0000
DD	0.076022	0.011138	6.825389	0.0000
ADD	0.281122	0.032892	8.546706	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.034125	R-squared	0.723153
Mean dependent var	0.770432	Adjusted R-squared	0.653218
S.D. dependent var	0.064901	S.E. of regression	0.038219
Akaike info criterion	-3.512036	Sum squared resid	0.838435
Schwarz criterion	-2.583466	Log likelihood	1410.333
Hannan-Quinn criter.	-3.153557	F-statistic	10.34033
Durbin-Watson stat	1.488095	Prob(F-statistic)	0.000000

c. IDM (Mandiri), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Dependent Variable: IDM

Method: Panel Least Squares

Date: 12/14/24 Time: 22:07

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 67

Total panel (balanced) observations: 335

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.541967	0.033785	16.04187	0.0000
DD	0.069193	0.016006	4.322944	0.0000
ADD	0.254120	0.051431	4.941029	0.0000
DAIS	0.022444	0.007663	2.928829	0.0037

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.036367	R-squared	0.666088
Mean dependent var	0.805305	Adjusted R-squared	0.579144
S.D. dependent var	0.063028	S.E. of regression	0.040889
Akaike info criterion	-3.372422	Sum squared resid	0.443047
Schwarz criterion	-2.575439	Log likelihood	634.8807
Hannan-Quinn criter.	-3.054688	F-statistic	7.661181
Durbin-Watson stat	1.370567	Prob(F-statistic)	0.000000

d. IDM (Berkembang dan Maju), DD, ADD, BKK DAIS Kal

Dependent Variable: IDM

Method: Panel Least Squares

Date: 12/14/24 Time: 21:58

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 77

Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.538274	0.027983	19.23602	0.0000
DD	0.058641	0.015068	3.891795	0.0001
ADD	0.186691	0.042129	4.431427	0.0000
DAIS	0.095529	0.014469	6.602159	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.029409	R-squared	0.645673
Mean dependent var	0.740087	Adjusted R-squared	0.553897
S.D. dependent var	0.049470	S.E. of regression	0.033041
Akaike info criterion	-3.799462	Sum squared resid	0.332978
Schwarz criterion	-2.978008	Log likelihood	811.3964
Hannan-Quinn criter.	-3.473670	F-statistic	7.035283
Durbin-Watson stat	1.787151	Prob(F-statistic)	0.000000